

**PANDANGAN MASYARAKAT
TERHADAP TINDAK KEKERASAN
ATAS NAMA AGAMA**

**(Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan
Dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama)**

Editor:

H. Bashori A. Hakim

**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
J A K A R T A
2010**

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Pandangan Masyarakat terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama (Studi
Hubungan antara Pemahaman Keagamaan dengan Tindak Kekerasan Atas Nama
Agama)

Ed. I. Cet. 1. -----
Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2010
x + 70 hlm; 21 x 29 cm

ISBN 978-979-797-286-8

Hak Cipta 2010, pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,
termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy,
tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan Pertama, September 2010

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA
(Studi Hubungan antara Pemahaman Keagamaan dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama)

Penulis:

DR. Zirmansyah
Dibantu Tim Peneliti:
H.Bashori A.Hakim, H.Mursyid Ali, Muchtar,
H.Nuhrison M. Nuh, Asnawati, H.Haidlor Ali Ahmad, Ahmad Rosyidi.

Litkayasa:

Eko Aliroso, H. Sutjipto, H.Fathan Kamal,
Mulyadi, Lastriyah.

Editor:

Drs H. Bashori A. Hakim, MSi

Desain cover dan Lay out oleh:
Akmal Salim Ruhana

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Gedung Bayt al-Qur'an Museum Istiqlal Komplek Taman Mini
Indonesia Indah, Jakarta Telp/Fax. (021) 87790189, 87793540

Diterbitkan oleh:

Maloho Jaya Abadi Press, Jakarta
Anggota IKAPI No. 387/DKI/09
Jl. Jatiwaringin Raya No. 55 Jakarta 13620
Telp. (021) 862 1522, 8661 0137, 9821 5932 Fax. (021) 862 1522

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Pada hakekatnya tidak satupun agama di dunia ini yang secara normatif mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan tindak kekerasan terhadap sesama manusia, sekalipun terhadap orang ataupun kelompok orang yang berbeda agama. Namun bisa terjadi agama yang oleh para pemeluknya diyakini mengandung nilai-nilai luhur dan mengajarkan kedamaian itu, oleh sementara penganutnya justru dijadikan sebagai alat pembenaran bagi sikap dan perilaku kekerasan (*violence*) dalam upaya memaksakan kehendaknya. Dalam konteks demikian, mereka melakukan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Perilaku kekerasan atas nama agama itu tidak menjadi monopoli kelompok penganut agama tertentu, tetapi dalam kenyataan dilakukan pula oleh penganut berbagai agama.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat akhir-akhir ini, kecenderungan timbulnya tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama dalam masyarakat terlihat semakin marak. Kenyataan itulah agaknya yang menjadi motivasi Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2009 melakukan penelitian tentang "*Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama*" di beberapa daerah, yang hasil penelitiannya disosialisasikan melalui Buku ini.

Selaku Pimpinan Badan Libang dan Diklat Kementerian Agama RI, kami menyambut baik penerbitan Buku hasil penelitian dengan judul di atas untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan instansi terkait, sebagai salah satu upaya sosialisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Kepada Kepala

Puslitbang Keagamaan Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D., kami ucapkan terima kasih yang telah memprakarsai penerbitan Buku hasil penelitian ini.

Kami mengharapkan, untuk masa-masa mendatang kajian dengan topik serupa dilakukan pula di daerah-daerah lain secara lebih luas dengan lebih memperhatikan karakteristik budaya dan sentimen keagamaan masyarakat di daerah. Kajian tidak hanya dilakukan kepada komunitas muslim, tetapi juga kepada komunitas umat beragama lain. Dengan demikian dapat diperoleh hasil kajian tentang pandangan masyarakat terhadap tindak kekerasan atas nama agama di berbagai daerah secara komprehensif.

Jakarta, September 2010

Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 19570414 198203 1 003

KATA PENGANTAR
KEPALA PUSLITBANG
KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas rahmat Nya Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2010 dapat mengagendakan Buku *“Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama (Studi Hubungan Antar Pemahaman Keagamaan dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama)”* ini.

Buku ini pada dasarnya berisi tentang hasil penelitian dengan judul di atas, merupakan salah satu dari berbagai program penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2009.

Penelitian lapangan dilakukan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dengan menggunakan metode gabungan yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan metode gabungan tersebut dimaksudkan agar pengumpulan data oleh para peneliti di lapangan dapat dilakukan secara maksimal dan lebih komprehensif. Artinya, data yang tidak dapat terjaring melalui penyebaran kuesioner (*metode kuantitatif*) dapat ditelusuri dan diperdalam melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan kunci (*metode kualitatif*).

Perihal perilaku kekerasan dengan mengatasnamakan agama, sebenarnya dapat terjadi di semua kalangan umat beragama. Namun karena keterbatasan-keterbatasan yang lebih bersifat teknis administratif, maka penelitian kali ini dikonsentrasikan kajian terhadap umat Islam.

Penentuan sampel lokasi penelitian sebanyak 12 (dua belas) kabupaten/kota dari 6 (enam) propinsi yang diambil

secara *purposive*, diharapkan dapat mewakili kalangan umat Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

Adapun penelitian di atas dimaksudkan untuk mengungkap beberapa aspek, meliputi: ada tidaknya hubungan antara perilaku kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh sementara kalangan masyarakat Islam dengan pemahaman agama mereka, tentang kuat-lemahnya keinginan aktualisasi ajaran agama, serta faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan atas nama agama.

Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai sosialisasi hasil-hasil penelitian di atas kepada masyarakat dan instansi terkait sebagai bahan informasi, terutama mengenai permasalahan yang dijadikan konsentrasi kajian dalam penelitian ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada DR. Zirmansyah dan Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan atas kerjasamanya sehingga penyusunan buku ini dapat terwujud. Ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si yang telah mengedit laporan penelitian di atas dalam proses penyusunan buku ini. Ucapan serupa juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Semoga bermanfaat .

Jakarta, Juli 2010
Kepala Puslitbang
Kehidupan Keagamaan,



Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D.
NIP. 19600416198903 1 005

PENGANTAR EDITOR

Buku berjudul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama (Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan Dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama)*" ini berisi tentang hasil-hasil penelitian dengan topik di atas, yang ditulis DR. Zirmansyah berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2009.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan data lebih lengkap, lebih utuh dan mendalam. Data yang tidak terjamah melalui kuesioner (metode kuantitatif) dapat ditelusuri secara lebih mendalam melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji (metode kualitatif).

Di tingkat analisis data, penggunaan dua metode secara bersama dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman dan pemaknaan terhadap data sejenis secara lebih tepat dan lebih luas mengenai pandangan masyarakat terhadap perilaku kekerasan atas nama agama, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya perilaku kekerasan atas nama agama dalam masyarakat. Hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh melalui penghitungan dengan bantuan Program SPSS (*Statistic Package for Social Sciences*) versi 16.0, dipadukan dengan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan kunci.

Sebagai karya ilmiah yang berisi hasil kajian dari 12 (dua belas) kabupaten/kota dari 6 (enam) wilayah propinsi yakni: Solo dan Temanggung (Jawa Tengah), Depok dan

Tasikmalaya (Jawa Barat), Mataram dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Palu Barat dan Kulawi Sigi (Sulawesi Tengah), Makassar dan Goa (Sulawesi Selatan), serta Pontianak dan Singkawang (Kalimantan Barat), buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara singkat tentang pandangan masyarakat (Islam) terhadap tindak kekerasan atas nama agama di berbagai daerah di Indonesia.

Disadari, sebagai hasil kajian yang diharapkan secara representatif dapat mewakili pandangan umat Islam di berbagai wilayah, teknik pengambilan sampel terutama perbandingan jumlah responden untuk tiap kabupaten/kota dalam penelitian ini secara metodologis dirasakan ada kelemahan, karena kurang proporsional. Sekalipun demikian, kelemahan ataupun bias yang mungkin terjadi secara keseluruhan tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap hasil analisis data, karena hasil analisis kuantitatif yang diperoleh dipadukan atau disinkronkan dengan hasil analisis data sejenis yang diperoleh dari data kualitatif. Melalui cara perpaduan analisis demikian diharapkan dapat mengurangi kelemahan maupun bias yang mungkin terjadi.

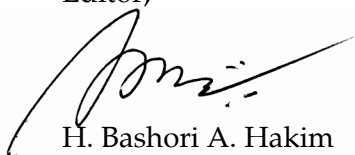
Terkait dengan metode kuantitatif, penggunaan statistik deskriptif dan inferensial, dengan menggunakan skor maksimal dan minimal, nilai rerata, serta standar deviasi, rupanya dianggap tepat oleh Penulis untuk mengolah data lapangan yang terkumpul, yang kemudian disajikan dalam paparan hasil penelitian di atas. Teknik penyusunan angket/kuesioner menggunakan model skala Likert dengan rentang skor 1 s/d 5 untuk butir-butir pernyataan yang positif dan skor 5 s/d 1 untuk butir-butir pernyataan negatif, dimaksudkan untuk memberikan alternatif pilihan jawaban kepada responden secara lebih luas, sehingga informasi yang didapat dari jawaban responden dengan sendirinya akan lebih rinci dan mendalam. Dengan demikian, di tingkat analisis data dalam rangka uji hipotesis

dapat dilakukan interpretasi data secara lebih cermat dan mendalam.

Metode kuantitatif dan metode kualitatif selain dipergunakan secara terpadu untuk pemaknaan dalam proses interpretasi data, masing-masing metode secara terpisah dipergunakan untuk menganalisis data sesuai jenisnya. Artinya, metode kuantitatif secara spesifik dengan teknik analisisnya dipergunakan untuk uji hipotesis penelitian. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk menjelaskan dan mengungkap data kualitatif termasuk mengenai pandangan masyarakat tentang faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku kekerasan atas nama agama. Data terkait dengan permasalahan ini tidak terjaring melalui angket/ kuesioner.

Jakarta, Juli 2010

Editor,



H. Bashori A. Hakim

NIP.195005091978031 002

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----|
| SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI | iii |
| KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN | v |
| PENGANTAR EDITOR | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan | 8 |
| D. Kegunaan | 9 |
| E. Ruang Lingkup dan Sasaran Penelitian | 9 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS | |
| A. Deskripsi Teori | 11 |
| B. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian | 29 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tempat dan Waktu Penelitian | 33 |
| B. Metode Penelitian | 33 |
| | |
| BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN | |
| A. Deskripsi Data Hasil Penelitian | 39 |
| B. Jawaban Terhadap Masalah Penelitian | 46 |
| C. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Kekerasan Atas Nama Agama | 60 |
| D. Berbagai Solusi Yang Ditawarkan Para Informan untuk Mencegah/ Menghindari Munculnya Kekerasan Atas Nama Agama..... | 63 |

| | | |
|----------------------|----------------------|----|
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 65 |
| | B. Rekomendasi | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia dilihat dari sejarah adalah sebagai suatu bangsa yang lama mengalami berbagai macam kekerasan akibat penjajahan bangsa asing. Setelah merdeka, kekerasan yang pernah dialami pada masa penjajahan itu tidak dirasakan lagi. Pengalaman pahit akibat penjajahan bangsa asing yakni Belanda, Jepang, Portugis, dan Inggris itu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kultur damai yang kuat dan mengakar. Selain pengalaman sejarah, bangsa Indonesia dilihat dari segi agama terdiri atas masyarakat yang agamis sehingga mereka pada dasarnya menentang kekerasan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari sikap agamis mereka, bahwa pada dasarnya tidak satupun agama yang mengajarkan perilaku kekerasan kepada sesama manusia. Ajaran demikian tidak luput diajarkan pula dalam agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan agama Islam, istilah "*Islam*", secara etimologis dapat berarti "*keselamatan*", "*kedamaian*", atau "*penyerahan diri secara total*" kepada Tuhan. Bila kata *Islam* diartikan "*perdamaian*", maka terjemahan firman Allah: *Inna al-din 'inda Allah al-Islam* , (Q.s. Ali Imran/3:19) menjadi "*Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama perdamaian.*" Dengan demikian boleh jadi perilaku keseharian orang Islam seharusnya adalah membawa kedamaian, selaras dengan firman Allah di atas.

Berdasarkan pemahaman demikian itu maka seorang Muslim adalah orang yang selalu berusaha menegakkan perdamaian di manapun ia berada. Para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, pada dasarnya menganut (agama) "*Islam*", atau agama perdamaian. Dalam menyebarkan ajaran agama, para nabi menyebarkannya secara damai. Tetapi bila dalam keadaan sangat terpaksa karena orang kafir melakukan tindakan ofensif misalnya, maka mereka terpaksa dibalas dengan yang setimpal, pedang dilawan dengan pedang. Sekalipun demikian, jika terpaksa harus terjadi perlawanan dengan orang-orang kafir maka harus dihadapi dengan sikap kasih sayang. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar umat Islam dalam menghadapi perlawanan dari orang-orang kafir dihadapi dengan watak Islam, yakni dengan kasih sayang (Q.S. Al-Baqarah/2: 191, Q.s. An Nisa/4: 89, 91; (Q.s. Al-Anbiya/21: 108).

Kita sama-sama mengetahui bahwa semua agama bertujuan untuk menjadikan setiap pemeluknya menjadi individu yang mulia. Hal itu tercermin dari komitmen ajaran-ajarannya yang menghendaki kedamaian dan anti kekerasan. Persoalannya kemudian, mengapa perilaku kekerasan justru kerap dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang notabene beragama.

Kekerasan atas nama agama merupakan kejahatan terburuk yang pernah dan akan tetap mewarnai peradaban manusia. Perbuatan demikian pada hakekatnya merupakan sesuatu yang paradoks, karena disatu pihak sesungguhnya agama mengajarkan nilai-nilai luhur, tetapi kenyataannya dijumpai kelompok-kelompok atau individu-individu dengan mengatas namakan agama malah berbuat kerusakan, melakukan berbagai tindak kekerasan, sehingga agama yang diyakini anti kekerasan tersebut seringkali dituding dan

seakan-akan harus bertanggung jawab terhadap kekerasan dan kerusakan yang dilakukan penganutnya.

Mengapa agama yang mengajarkan kesejukan, kedamaian, kesentosaan, kasih sayang dan nilai-nilai luhur lainnya itu di antara penganutnya ada yang tampil dengan wajah yang keras, garang dan menakutkan, sehingga agama kerap dihubungkan dengan radikalisme, ekstrimisme, bahkan terorisme. Agama dikaitkan dengan bom bunuh diri, pembantaian, penghancuran gedung, dan lain-lain yang menunjukkan penampilan agama yang menakutkan.

Peran agama sebagai perekat heterogenitas dan pereda kekerasan sudah lama dipertanyakan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia yang menghuni muka bumi ini begitu heterogen terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, kultur, budaya serta paham agama yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan heterogenitas dan kekerasan, Huntington mengatakan bahwa perbedaan tidak mesti kekerasan, dan kekerasan tidak mesti terjadi karena adanya perbedaan. Dalam dunia baru, kekerasan-kekerasan yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya bukanlah kekerasan antarkelas sosial, antar golongan kaya dengan golongan miskin, atau antara kelompok-kelompok (kekuatan) ekonomi lainnya, tetapi kekerasan antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda. Selama berabad-abad, perbedaan entitas agama telah menimbulkan kekerasan yang paling keras dan paling lama, paling luas, dan paling banyak memakan korban. Dalam citranya yang negatif, agama seakan-akan memberikan kontribusi terhadap terjadinya penindasan dan kekerasan. Agama telah menjadi tirani, dimana atas nama Tuhan orang melakukan kekerasan, menindas, ketidakadilan, membunuh, meneror dan sebagainya.

Memang ada pendapat yang mencoba mengaitkan bermacam bentuk kekerasan dan perang agama dengan bangkitnya fundamentalisme agama. Karena fundamentalisme agama seseorang atau kelompok, ketika terhalang atau tidak dapat mengekspresikan keinginannya, atau cita-cita sosial-politiknya, akhirnya melakukan berbagai bentuk ekstrimisme dan seringkali diikuti oleh kekerasan sebagai reaksi terhadap terhalangnya upaya mengekspresikan cita-cita sosial dan politiknya. Sebagaimana yang dinyatakan Armstrong, fundamentalisme merupakan salah satu fenomena paling mengejutkan pada akhir abad 20. Ekspresi fundamentalisme ini terkadang cukup mengerikan. Para fundamentalis menembaki jamaah yang sedang salat di masjid, membunuh dokter dan perawat yang sedang bertugas di rumah sakit, membunuh presiden, dan bahkan mampu menggulingkan pemerintahan yang kuat.

Di Indonesia, aspek lain penyebab munculnya kekerasan atas nama agama dalam dekade akhir-akhir ini, boleh jadi reaksi dari gaya represif pemerintah rezim terdahulu, sebagai kelanjutan penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, pada era Orde Lama dan terlebih pada era Orde Baru, tindak kekerasan sering muncul ketika terdapat perbedaan antara masyarakat dalam hal ini umat Islam dengan pemerintah tentang suatu sistem yang ideal dalam bernegara.

Perbedaan cara pandang seharusnya akan sangat konstruktif dan bahkan akan konstruktif ketika semangat demokrasi partisipatif dan pluralisme dijadikan landasan berpikir dan bertindak oleh kedua belah pihak yang berbeda. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan rezim Orde Lama dan Orde Baru. Dengan alasan stabilitas politik yang sesungguhnya adalah demi kepentingan penguasa, semua bentuk koreksi terhadap jalannya pemerintahan di jawab dengan sangat represif, seperti; pengebosan ke dalam sel atau

pembredelan bagi media massa. Pada era Orde Baru, alat ampuh untuk membungkam semua aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam melalui UU Politik No 5. Melalui UU tersebut, aspirasi mayoritas bangsa Indonesia, jika berbeda dengan pemerintah, maka pemerintah menyebut mereka dengan sebutan separatis atau minimal subversif.

Setelah reformasi, kelompok-kelompok yang ketika era orde baru selalu mengalami penindasan dan terpinggirkan mulai muncul dan menuntut agar aspirasi mereka didengar, agar eksistensi mereka diakui, dan sebagainya. Sedangkan kelompok lain, yang ketika orde baru selalu mendominasi, terbiasa melanggar aturan dan sebagainya maka oleh kelompok pertama tadi mendapat tantangan, ketika pemerintah tidak tegas maka kelompok pertama tadi akhirnya mencoba menegakkan aturan-aturan. Penegakan aturan itu akhirnya memunculkan perilaku kekerasan. Karena ketika kelompok ini dalam menegakkan aturan sering membawa atribut agama, maka terhadap kekerasan yang mereka lakukan lantas dikaitkan dengan agama, sehingga muncullah jargon baru yaitu kekerasan atas nama agama.

Salah satu contoh adalah ketika lambannya respon pemerintah (polisi) memenuhi tuntutan kelompok agama tertentu untuk menutup majalah Playboy, majalah yang oleh kelompok itu dianggap dapat menurunkan moral umat, kelompok tersebut akhirnya melakukan sendiri penggerebekan dan menutup kantor majalah Playboy. Kekerasan lain atas nama agama adalah peristiwa tanggal 19 Januari 1999, di mana ribuan umat Kristen menyerbu umat Islam yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, yang jika ditilik dari akar permasalahannya adalah perselisihan antara dua orang warga Ambon yang berbeda agama (seorang sopir dan seorang preman). Ketika itu pemerintah (polisi) lamban mengambil tindakan tegas dan tepat untuk menyelesaikan

perselisihan tersebut. Peristiwa paling mutakhir yang menghebohkan Indonesia yang berkaitan dengan tindak kekerasan atas nama agama adalah bom bunuh diri yang terjadi di hotel J.W Marriot dan Hotel Ritzt Carlton, di Mega Kuningan, tanggal 21 Juli 2009 yang lalu.

Sesungguhnya kekerasan atas nama agama diterapkan oleh penganut di semua agama, baik agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Sinto, maupun Yahudi. Dalam sejarahnya, penggunaan kekerasan ternyata menjadi cara yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-idenya, seperti kelompok Nihilis di Rusia era Tzar, Leon Czolgosz, grup N17 di Yunani, bahkan di Spanyol terdapat slogan yang berbunyi; *Terkadang cinta hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan.*

Dengan perkataan lain, tindak kekerasan merupakan suatu pola tingkah laku alamiah manusia yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari kalangan apapun, termasuk tentunya dari penganut agama apapun.

Sebagai suatu istilah, kekerasan atas nama agama dapat mencakup: (1) kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok, baik dari kelompok agama yang sama atau kelompok agama yang berbeda, baik yang didorong oleh motivasi keagamaan maupun faktor yang lain; (2) kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara mengucilkan, mengintimidasi, atau mengusir kelompok lain yang memiliki keyakinan agama yang dianggap menyimpang atau berbeda; dan (3) kekerasan berupa perusakan atau penistaan terhadap objek atau simbol keagamaan seperti kitab suci, nabi, dan tempat peribadatan.

Dilihat dari bentuk dan jenisnya, kekerasan atas nama agama banyak macam dan ragamnya, mulai dari yang paling "kecil" dan "sederhana" seperti memukul anak agar taat

kepada orangtua, agar anak menunaikan salat, sampai yang besar seperti angkat senjata melawan rezim yang dianggap memusuhi agamanya. Dilihat dari ruang kejadian, kekerasan atas nama agama bisa terjadi di ruang domestik seperti kekerasan terhadap anak dan istri, dan bisa juga di ruang publik seperti menghancurkan tempat-tempat yang dianggap sarang maksiat. Semua ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan atas nama agama.

Pertanyaan logisnya adalah apa yang menyebabkan itu semua? Benarkah agama dapat dituding sebagai sumber kekerasan? Mengapa setiap kita membicarakan kekerasan cenderung bermuara kepada isu agama?. Apakah mungkin agama menjadi penyebabnya atautkah karena cara memahaminya yang berbeda disebabkan perbedaan pengetahuan? Atautkah para pengikutnya saja yang cenderung mengambil keuntungan pribadi dengan mengedepankan atau berlindung dalam ajaran agama?

Berangkat dari latar belakang di atas, maka Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama dalam hal ini Puslitbang Kehidupan Keagamaan menganggap penting untuk melakukan suatu kajian yang komprehensif dan mendalam tentang pemahaman agama dan kaitannya dengan kekerasan atas nama agama. Atas pertimbangan faktor keterbatasan finansial dan luasnya wilayah cakupan kajian, maka penelitian ini dibatasi kajian di kalangan umat Islam.

Melalui kajian ini akan dijawab faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang atau kelompok agama melakukan tindak kekerasan atas nama agama, apakah perbedaan pemahaman, perbedaan keinginan mengaktualisasikan pemahaman, serta apakah faktor budaya mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang untuk melakukan tindak kekerasan atas nama agama

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman agama dengan tindak kekerasan atas nama agama;
2. Apakah terdapat hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama;
3. Apakah terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi dengan yang memiliki pemahaman agama yang rendah;
4. Apakah terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang kuat keinginan untuk melakukan aktualisasi agama dengan yang kurang kuat;
5. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau meredam munculnya tindak kekerasan atas nama agama.

C. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Ada tidaknya hubungan antara pemahaman agama dengan tindak kekerasan atas nama agama;
2. Ada tidaknya hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama;
3. Ada tidaknya perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi dengan yang memiliki pemahaman agama yang rendah;

4. Ada tidaknya perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang kuat keinginan melakukan aktualisasi agama dengan yang kurang kuat;
5. Alternatif solusi untuk mengurangi atau meredam munculnya tindak kekerasan atas nama agama.

D. KEGUNAAN

Hasil penelitian ini selain diharapkan dapat memberikan gambaran dan jawaban yang komprehensif mengenai latar belakang, faktor-faktor penyebab, bentuk-bentuk kekerasan atas nama agama, juga memberikan alternatif jawaban dalam mengatasi keterkaitan antara pemahaman agama dengan tindak kekerasan atas nama agama. Hasil penelitian ini menjadi informasi bagi pimpinan Kementerian Agama dan instansi terkait sebagai dasar alternatif untuk menyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama, serta mengoptimalkan peran institusi keagamaan maupun masyarakat khususnya para tokoh agama, para cendekia dalam mengembangkan program yang dapat mencegah munculnya kekerasan atas nama agama.

E. RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengungkapan korelasi atau hubungan antara pemahaman agama dan aktualisasi ajaran agama dengan perilaku kekerasan atas nama agama, termasuk korelasi antara tingkat (tinggi-rendahnya) pemahaman agama dan tingkat aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama.

Sedangkan sasaran penelitian adalah individu atau kelompok individu yang menjadi anggota organisasi

keagamaan. Organisasi keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi keagamaan yang memiliki anggota cukup signifikan dalam masyarakat di lokasi penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. DESKRIPSI TEORI

1. Pengertian Kekerasan Atas Nama Agama

a. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan salah satu kejahatan struktural yang berbahaya. Kekerasan yang sulit dibongkar adalah kekerasan politik yang dipakai dalam sistem sosial politik.¹ Secara sistematis bentuk kekerasan, lazimnya diterapkan oleh penguasa otoriter untuk menghadapi lawan politik, melemahkan oposisi, dan sejenisnya. Kekerasan politik terkait dengan kekerasan negara atau kekerasan yang terlembagakan, karena kekerasan terjadi bukan secara kebetulan tetapi didukung bangunan sistem sosial politik yang mendapat legitimasi dari sistem nilai dan ideologi.

Di negara-negara dunia ke tiga pada umumnya, kekerasan yang dilembagakan ini memakan banyak korban, seperti kelompok minoritas dan kaum oposisi. Mereka yang dipandang musuh oleh negara, yaitu kelompok yang tidak sesuai dengan politik penguasa maka secara sistematis akan menjadi korban kekerasan ini. Kekerasan sebagai alat untuk memberikan hukuman bagi para pelanggar kekuasaan atau tatanan sosial yang telah mengalami pergeseran makna karena kekerasan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan.

¹ Krishnamurti, J., 1982. *Bebas Kekerasan*, Yayasan Krishnamurti. Malang. h.11.

Artinya kekerasan yang tidak boleh dilakukan terhadap penguasa menjadi diperbolehkan terhadap rakyat biasa dan terhadap lawan politik dari penguasa. Sementara itu dalam kekerasan struktural, terdapat dialektika antara pelaku dengan struktur. Penguasa cenderung mengatasmakan hukum dan ketertiban untuk melegitimasi perilaku kekerasan. Sementara pihak oposisi juga dapat melakukan kekerasan karena merupakan reaksi atas ketidaksetujuannya terhadap kebijakan penguasa.

Perilaku kekerasan juga disebut dengan istilah agresi, yaitu untuk menggambarkan perilaku destruktif yang sulit dikontrol, tidak hanya meliputi tindakan yang bersifat fisik, melainkan juga mencakup kekerasan verbal, psikologis dan simbolis, atau kombinasi dari berbagai aspek tersebut.²

Kata kekerasan yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan *khusyunat*, dan dalam bahasa Inggris berarti *violence* sering diartikan dengan; "suatu tindakan yang bersandar pada penggunaan ketegasan ekstra".³ Sebagian lagi mendefinisikannya sebagai; "Perilaku yang bertentangan dengan kelembutan dan sesuatu yang natural". Konsep kekerasan tidak jauh berbeda bahkan mirip dengan konsep-konsep abstrak lainnya seperti; kebebasan, toleransi, reformasi dan sebagainya yang dalam pendefinisianannya sangat berbeda dan sangat subjektif. Karena sangat subjektif, maka terdapat bermacam pendefinisian konsep kekerasan. Tidak satupun definisi yang memenuhi parameter ilmiah sebuah definisi, sehingga ada definisi kekerasan yang dikaitkan dengan kata teror, penyiksaan, pelaksanaan hukum pidana, reaksi

² Mattew, Arnold, 2006. *Culture and Anarchy*. New York: Macmillan. Third edition, h.26

³ Ismail SM dan Abdul Mukti (ed.).2000. *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.43.

kekerasan. Ada juga yang memasukkan penyitaan dan embargo sebagai suatu bentuk dari tindak kekerasan.

b. *Teori Perilaku Kekerasan*

Perilaku kekerasan dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori, antara lain; (1) teori belajar actor, (2) teori insting, (3) teori kepribadian, (4) teori kognitif, dan (5) teori frustrasi agresif.

1) Teori Belajar Sosial

Menurut Bandura yang dikutip Bem, perilaku individu pada umumnya dipelajari secara observasional melalui pemodelan, yaitu mengamati bagaimana suatu perilaku baru dibentuk dan kemudian menjadi informasi penting dalam mengarahkan perilaku.⁴ Sebagian besar perilaku individu diperoleh sebagai hasil belajar melalui pengamatan atas perilaku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi model. Contoh: kegiatan demonstrasi yang dilanjutkan dengan tindakan anarkhis (membakar ban di tengah jalan, merobohkan pintu gerbang, bentrok dengan aparat keamanan, dan sebagainya) di suatu tempat dapat menjadi model perilaku kekerasan bagi para demonstran di tempat lain.

2) Teori Insting

Teori Freud mengenai insting kerap mengundang kontroversi. Teori ini menegaskan bahwa timbulnya perilaku kekerasan adalah karena insting, yaitu perwujudan psikologis dari suatu sumber rangsangan actor dalam yang dibawa sejak lahir. Dengan teori ini diasumsikan semua orang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Semula Freud mengemukakan bahwa perilaku kekerasan itu berkaitan erat dengan energi libidoseksual. Jika insting seksual ini mengalami hambatan maka timbullah perilaku kekerasan.

⁴ Daryl. J. Bem.1988. *Social Psychology in the Seventies*. Belmont, California: Broke & Cole. h. 258.

Selanjutnya Freud mengemukakan dikotomi energi positif dan energi destruktif yang keduanya diduga memiliki dasar biologistik yang harus terwujud dalam perilaku nyata. Jika energi destruktif mengarah ke pihak luar maka menjadi pemicu perilaku kekerasan terhadap orang lain, sedangkan jika mengarah ke diri sendiri maka dapat mendorong keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau perilaku bunuh diri.

3) Teori Kepribadian

Sifat-sifat kepribadian sebagai sifat internal berkorelasi dengan perilaku kekerasan termasuk emosi.⁵ Anak yang mengalami gangguan seperti cepat marah dan mudah menyerang cenderung mengembangkan pola perilaku kekerasan pada usia selanjutnya. Dengan demikian aktor temperamen yang merupakan bagian dari komponen kepribadian berkaitan dengan perilaku kekerasan.

4) Teori Kognitif

Konsep dasar teori kognitif mengacu pada kegiatan mental yang tidak dapat diubah begitu saja dalam menjelaskan perilaku actor dengan postulat yang sesungguhnya seperti persepsi, pikiran, intensi, perencanaan, keterampilan, dan perasaan. Teori kognitif actor menekankan pentingnya interaksi resiprokal actor-faktor individu sebagai penentu perilaku kekerasan.⁶

5) Teori Frustrasi-Agresi

Terjadinya frustrasi adalah jika seseorang tidak dapat memiliki sesuatu yang diinginkan pada waktu orang tersebut benar-benar memerlukannya. Schacter, menyatakan setiap

⁵ David. C. McClelland. 1976. *The Achievement Motive*. New York: Appleton-Century Crofts. h. 112.

⁶ Woolfolk, Anita E. 1993. *Educational Psychology*. New York: Allyn and Bacon Inc.h. 82.

tindakan agresi dan kekerasan pada akhirnya dapat dilacak penyebabnya dalam kaitannya dengan frustrasi.⁷

c. *Politik dan Perilaku Kekerasan di Indonesia*

Selama Orde Baru berkuasa, meskipun ada kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain, terutama dalam saat kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ketika satu partai atau calonnya mengalami kekalahan, muncul demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkhis, bentrokan antara kelompok yang setuju dan menolak terhadap suatu kebijakan dan berbagai peristiwa kekerasan lainnya. Akan tetapi kejadian tersebut tidak terlalu sering, dan periode ini dianggap periode yang lebih aman dan damai. Orang tidak mau atau mungkin takut untuk mengkaji kaitan atau pengaruh politik yang cenderung otoriter ternyata memberikan kontribusi terhadap ketertiban sosial karena dapat meredam kekerasan dalam masyarakat. Subangun, menyatakan hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) sejak zaman penjajahan sudah muncul opini bahwa masyarakat tradisional Indonesia adalah masyarakat yang damai; (2) berkembangnya ide bahwa Orde Baru merupakan suatu kekuatan untuk kedamaian sosial sebagai lawan dari adanya pembantaian massal yang dilakukan oleh para anggota PKI pada tahun 1965.⁸

Menurut Klinken (2005) bahwa perilaku kekerasan di Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era reformasi ini menjadi lebih panjang dari masa sebelumnya. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan melawan negara, seperti: kekerasan di Timor Timur, Papua, dan Aceh,

⁷ Schacter, S. 1961. *The Psychology of Affiliation*. London : Tavistock Publication. h. 112.

⁸ Emmanuel, Subangun. 1999. *Politik Anti Kekerasan Paska Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

serta kekerasan antar masyarakat seperti kekerasan di: (a) Poso Sulawesi Tengah (b) Ambon dan Maluku, (c) Kalimantan Barat, (d) Maluku Utara, Kalimantan Tengah, dan yang masih sangat hangat segar dalam ingatan kita, terjadi di Sumatera Utara.

d. Jenis-Jenis Kekerasan

Tokoh utama kaum pelaku kekerasan adalah Mikhail Bakunin, seorang bangsawan Rusia yang kemudian sebagian besar hidupnya tinggal di Eropa Barat. Ia memimpin kelompok pelaku kekerasan dalam konverensi besar kaum Sosialis sedunia, dan terlibat pertengkar dan perdebatan besar dengan Marx. Bakunin akhirnya dikeluarkan dari kelompok Marxis mainstream dan perjuangan kaum pelaku kekerasan dianggap bukan sebagai perjuangan kaum sosialis. Sejak Bakunin, pelaku kekerasan identik dengan tindakan yang mengutamakan kekerasan dan pembunuhan sebagai basis perjuangan mereka. Pelaku kekerasan setelah Bakunin berkembang menjadi sebuah gerakan yang menjadikan kekerasan sebagai jalur perjuangan mereka, yang dilakukan dalam pola dan tujuan yang berbeda-beda.

1) Kekerasan Kolektif

Doktrin utama dari pelaku kekerasan-kolektif adalah "*penghapusan segala bentuk negara*" dan "*penghapusan hak milik pribadi dalam pengertian proses produksi*". Doktrin pertama merupakan terminologi umum pelaku kekerasan, tetapi kemudian diberikan penekanan pada istilah "*kolektif*" oleh Bakunin sebagai perbedaan terhadap ide negara sosialis yang dihubungkan dengan kaum Marxis. Sedangkan pada doktrin kedua, pelaku kekerasan-kolektif mengutamakan penghapusan adanya segala bentuk hak milik yang berhubungan dengan proses produksi dan menolak hak milik secara kolektif yang dikontrol oleh kelompok tertentu. Menurut mereka, pekerja seharusnya dibayar berdasarkan

jumlah waktu yang mereka kontribusikan pada proses produksi dan bukan "*menurut apa yang mereka inginkan*".

2) *Kekerasan Individual*

Pelaku kekerasan individual menekankan pada persamaan kebebasan dan kebebasan individual. Kelompok ini memiliki kepercayaan bahwa "*hati nurani individu seharusnya tidak boleh dibatasi oleh institusi atau badan-badan kolektif atau otoritas publik*". Karena berasal dari tradisi liberalisme, individual-pelaku kekerasan sering disebut juga dengan nama "*pelaku kekerasan liberal*".

Tokoh-tokoh yang terlibat dalam individual pelaku kekerasan antara lain adalah Max Stirner, Josiah Warren, Benjamin Tucker, John Henry Mackay, Fred Woodworth, dan lain-lain. Kebanyakan dari tokoh-tokoh individual-pelaku kekerasan berasal dari Amerika Serikat, yang menjadi basis liberalisme. Oleh karena itu pandangan mereka terhadap konsep individual pelaku kekerasan banyak dipengaruhi oleh pemikiran liberalisme. Salah satu tokoh pelakunya yaitu Max Stirner, menulis buku yang menggambarkan pemberontakan serta tidak perlu adanya pemberian rasa hormat kepada otoritas dan Negara.

e. *Kekerasan dan Agama*

1) *Kekerasan Dalam (Interpretasi Komunitas) Kristen*

Dalam agama Kristen, konsep yang dipakai oleh kaum pelaku kekerasan adalah bahwa hanya Tuhan yang mempunyai otoritas dan kuasa di dunia ini, sehingga mereka menolak otoritas Negara. Mereka menganggap gereja sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan. Dari konsep ini kemudian berkembang konsep-konsep yang lain, misalnya: anti perang, penghapusan kontrol negara dan penolakan membayar pajak kepada negara. Semuanya itu dalam konteks bahwa kekuasaan negara tidak lagi eksis di bumi dan oleh karena itu

harus ditolak. Indikasi lain dari adanya kekerasan dalam agama Kristen adalah kasus pembantaian pengikut protestan oleh umat Katolik, yang disebabkan fanatisme dan fundamentalisme.

2) *Kekerasan Dalam (Interpretasi Komunitas) Islam*

Dalam agama Islam, terdapat kelompok yang berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang bercirikan penyerahan total kepada Allah. Dengan pemahaman ini mereka menolak peran dan otoritas manusia dalam bentuk apapun. Kelompok ini berkeyakinan hanya Allah lah yang mempunyai otoritas di bumi, serta menolak ketaatan terhadap otoritas manusia dalam bentuk fatwa atau imam. Cara pandang seperti ini, ditambah dari elaborasi atas konsep "*tiada pemaksaan dalam beragama*", akhirnya menjadi awal munculnya kekerasan dalam Islam, karena perbedaan pengetahuan dan pemahaman agama. Konsep ini kemudian berkembang dan muncullah konsep-konsep lainnya yang mempunyai kemiripan dengan ideologi sosialis seperti pandangan terhadap hak milik, penolakan terhadap riba, penolakan terhadap aturan-aturan negara dan sebagainya.

3) *Sejarah Lahirnya Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia*

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, tercatat beberapa perlawanan masyarakat terhadap kaum penjajah seperti Portugis dan Belanda yang dapat dimasukkan dalam kategori perjuangan melawan kekerasan atas nama agama. Perlawanan dan kekerasan yang terjadi di daerah yang dihuni oleh umat Islam dan dibawah pemerintahan Islam (Sultan) melawan pendatang asing yang beragama Katholik (Portugis) dan Protestan (Belanda), sehingga masyarakat memahaminya sebagai kekerasan yang bernuansa agama. Sebagai contoh dapat dikemukakan berikut:

Pada tahun 1512, Portugis yang telah tiba di Ternate, yang kedatangan semula untuk melakukan perdagangan cengkih, tidak dapat menahan nafsunya untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan kesultanan Ternate dan menyebarkan agama Katholik di kalangan penduduk Muslim. Tindakan penyebaran agama ini memicu kemarahan pihak kesultanan dan rakyat sehingga Portugis diserang. Pada tahun 1531 kepala Portugis di Ternate dibunuh oleh anggotanya sendiri dengan bantuan orang Ternate, akibatnya Boheyat, putra mahkota kerajaan Ternate ditangkap. Peristiwa itu memicu kemarahan para sultan yang tergabung dalam konfederasi Maluku Kie Raha (Persekutuan Empat Gunung). Pada tahun 1534 terjadi serangan terhadap Portugis yang dipelopori oleh sultan Bacan diikuti oleh sultan lainnya, yang mengakibatkan Portugis terusir dari Ternate ke Tidore. Peristiwa di atas dapat dikategorikan sebagai kekerasan atas nama agama.

Kekerasan atas nama agama juga muncul akibat adanya pemurtadan, berupa penyebaran agama Katholik ditengah penduduk muslim di Ambon, Haruku, dan Saparaua, hingga ke Ternate oleh Fansiscus Xaverius.

Penyebaran agama Katholik di kalangan umat Islam menimbulkan kemarahan para sultan, karena Islam pada waktu itu merupakan "nation" bagi kesultanan. Setiap warga harus beragama Islam. Mereka yang tidak beragama Islam tidak termasuk warga negara, tetapi sebagai penduduk yang dilindungi oleh negara, yang membayar upeti tahunan kepada negara. Oleh karena itu penyebaran agama Katholik di tengah masyarakat muslim dianggap sebagai upaya pemurtadan, yang berarti suatu pernyataan perang terhadap Sultan. Akhirnya pada tahun 1605, Portugis diusir dari Maluku oleh Ternate. Dengan keluarnya Portugis dari Ambon pada tahun 1605 ternyata memunculkan kekerasan baru atas nama agama.

Kehadiran VOC yaitu usaha dagang Belanda yang melancarkan perdagangan monopoli menimbulkan kekerasan baru dengan Sultan atau umat Islam di Maluku. VOC meskipun lebih mementingkan perdagangan dibandingkan dengan kristenisasi di kalangan umat Islam, tetapi kristenisasi tidak berhenti sama sekali.

Uraian di atas membuktikan, ternyata kekerasan atas nama agama di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan. Hanya saja terdapat perbedaan penyebab munculnya kekerasan. Pada masa Portugis kekerasan terjadi akibat politik dan penyiaran agama. Pada masa VOC "Belanda", kekerasan terjadi karena politik dan monopoli perdagangan. Namun demikian kekerasan-kekerasan tersebut intinya tetap sama yaitu baik Portugis maupun VOC "Belanda" sama-sama menjalankan misi keagamaan yaitu kristenisasi.

4) Pengaruh Penjajahan dan Munculnya Kekerasan Atas Nama Agama

Pengalaman sejarah pada zaman kolonial ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Portugis dan Belanda, menunjukkan bahwa akibat penjajahan tersebut mempengaruhi cara pandangan pemimpin-pemimpin Islam masa itu dan berimbas kepada sebagian umat Islam hingga sekarang. Pandangan keagamaan yang diterima sebagai warisan dari zaman kolonial adalah masyarakat memandang agama lain sebagai musuh, sebagai lawan atau paling tidak sebagai pesaing. Dengan cara pandang seperti itu, maka yang nampak adalah perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya bermuara pada sikap curiga serta tidak percaya terhadap agama lain, bahkan terhadap umatnya sendiri. Pandangan seperti ini akhirnya mempengaruhi sifat kejiwaan umat beragama yaitu berupa kebencian terhadap umat agama lain, iri hati dan dengki ketika melihat umat agama lain maju.

Pada masa kolonial, pemerintah dan umat Kristen memandang dan memperlakukan umat Islam sebagai warga negara kelas dua dengan stigma sebagai umat yang bodoh, terbelakang dan sebagainya. Akibat perlakuan ini, maka muncul pandangan dari sebagian umat Islam, bahwa dunia ini milik orang kafir, sedangkan akhirat milik umat Islam. Umat Islam sering mengidentikkan umat Kristen dengan Belanda atau penjajah.

2. *Pengertian Pemahaman Agama*

a. *Pengertian Pemahaman*

Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke sebuah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.⁹ Pemahaman adalah tingkatan kemampuan seseorang yang mampu menangkap makna, arti dari suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.¹⁰ Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, sehingga gambaran orang yang memahami adalah ia dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberikan contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan. Di dalam ranah kognitif dikatakan bahwa pemahaman tingkatannya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan.

Pemahaman menurut Sudijono adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan dapat

⁹ W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), h. 636

¹⁰ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), cet. ke-8, h. 44

melihatnya dari berbagai sudut pandang.¹¹ Jadi pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan". Saifuddin Azwar menyatakan bahwa paham berarti sanggup menjelaskan, mengklasifikasikan, mengikhti sarkan, meramalkan, dan membedakan.¹²

Honer dan Hunt, menyatakan bahwa pemahaman adalah hasil kerja pancaindera manusia dalam mendapatkan suatu informasi yang diolah dan diuji dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran sehingga informasi tersebut memberikan makna atau arti bagi dirinya.¹³ Dari pengolahan atau pengujian itu, pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya diterima sebagaimana kenyatannya. Pendapat di atas diperkuat oleh Krech, Crutchfield, and Ballachey yang mengemukakan bahwa pemahaman adalah pengetahuan yang diorganisasikan secara selektif dari sejumlah fakta, informasi serta prinsip-prinsip yang dimiliki yang diperoleh dari hasil proses belajar dan pengalaman. Ada tiga tipe pemahaman, yaitu: (1) pemahaman mengenai adanya sesuatu, (2) pemahaman teknis, yang meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara menggunakannya, serta (3) pemahaman prinsip, berkenaan dengan prinsip-prinsip dan berfungsinya obyek-obyek yang dimaksud.¹⁴

Kemampuan seseorang dalam upaya memahami, menalar, memecahkan suatu masalah serta mengolah informasi merupakan hal pokok dalam kemampuan kognitif.

¹¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-4, h. 50

¹² Saifuddin Azwar, *Tes Prestasi*, (Yogyakarta : Liberty, 1987), h. 62

¹³ Honer, Stanley M dan Thomas C. Hunt. 1984. dalam buku *Ilmu Dalam Perspektif*, Penyunting Jujun S. Suriasumantri. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 76.

¹⁴ Crutchfield, E.L. Ballachey et.al. 1962. *Individual in Society*. Tokyo: McGraw-Hill. h.142.

Kemampuan kognitif sendiri mengandung arti kegiatan mental yang terkait dalam proses memperoleh, memahami, menyimpan, memunculkan kembali dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar dalam menjawab suatu permasalahan. Selanjutnya pemahaman seseorang terhadap suatu objek pengetahuan mendukung penalaran, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara efektif. Dalam konteks agama, maka pemahaman, keyakinan, dan penghayatan tentang agama disebut dengan rasa keberagamaan atau religiusitas. Religiusitas adalah penghayatan agama seseorang yang menyangkut keyakinan, nilai dan perilaku yang didorong oleh kekuatan spiritual. Ada tiga paradigma yang dapat digunakan untuk memetakan varian tipologi keagamaan dan keberagamaan.¹⁵

Pertama, paradigma eksklusif. Orang atau kelompok orang yang memiliki paradigma ini berpandangan bahwa seseorang tidak akan diselamatkan kecuali kalau mengikuti iman yang dia akui, kecuali memeluk agama yang dia peluk. Agama-agama lain boleh jadi memiliki banyak kebenaran dan kebaikan, tetapi agama-agama lain tersebut dianggap tidak bisa menjadi mediasi keselamatan.¹⁶

Ekspresi keberagamaan penganut kelompok ini memiliki watak tertutup, anti dialog, *konservatif, cenderung fundamentalis, intoleran, apologis* dan *dogmatis* sehingga kurang kondusif, sering kali lebih menonjolkan sisi perbedaan dan menutup sisi persamaannya. Pendekatan yang dipakai oleh kelompok ini bersifat subyektif, yakni menilai kelompok lain berbeda dari perspektif kelompoknya semata. Kelompoknya dipandang paling benar, dan akan memperoleh keselamatan jika

¹⁵ Q.S Al-Maidah 15 : 3; Al-Imron (3 : 19 dan 85; Q.S. Al-Bayyinah 198 : 7., dan Hendriek Kremer., "Christian attitudes toward no Christian Religius" (Mineapolis, Fantress Press, 1995), h. 222-231.

¹⁶ J.B. Bana Wiratima SJ, *Sains Perspektip gereja Katolik*, (Yogyakarta, Dian/Anter Fidei, 1993 ; 4.

bergabung dengan kelompoknya, meyakini keyakinannya, sedangkan keyakinan di luar dirinya dianggap kebenaran yang palsu.

Hal demikian oleh Arkoun disebut sebagai sakralisasi terhadap pemikiran keagamaan. Bahkan kecenderungan pemahaman tentang agama itu sendiri dianggap sebagai agama yang wajib diikuti sehingga keberagaman mengalami stagnan dan akhirnya terjadilah marginalisasi dan alienasi agama dalam realitas empirik. Proses ini oleh Fazlur Rahman disebut sebagai proses "*Ortodoksi*".¹⁷ Paradigma ini sangat jauh dari kemungkinan terbukanya peluang dialog, interaksi dan toleransi antar umat beragama.

Kedua, paradigma inklusif. Kelompok inklusif membedakan antara kehadiran penyelamatan dan aktifitas Tuhan dalam tradisi agama-agama lain.¹⁸ Penganut inklusif lebih mengedepankan pemahaman ajaran agama secara kontekstual, esensi dan makna, sehingga implementasi ajaran agama mempertimbangkan dan memperhatikan konteks ruang dan waktu, situasi serta kondisi sosio-kultural di mana agama tersebut berada.

Setidaknya ada tiga gagasan utama yang melekat pada penganut inklusif yaitu: (1) bahwa substansi keimanan dan peribadatan lebih penting dari pada formalitas dan simbolisme keagamaan yang bersifat literal; (2) pesan-pesan agama yang bersifat abadi dalam esensinya dan universal dalam maknanya harus selalu ditafsirkan ulang oleh masing-masing generasi umat sesuai dengan konteks zaman yang dihadapi; (3) kebenaran mutlak hanyalah milik Tuhan, maka tak seorangpun yang dapat memastikan bahwa

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemah, Ahsin, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984; 105.

¹⁸ Q.S. Ali Imron 13: 64; Q.S Al-Maidah 15: 48

pemahamannya terhadap pesan Tuhan adalah paling benar, lebih benar atau lebih baik dari pada pemahaman orang lain.

Karenanya kelompok ini sangat menekankan pentingnya toleransi terhadap umat seagama maupun antar umat beragama karena perbedaan agama, budaya maupun politik dipandang sebagai fitrah kemanusiaan yang bersifat universal dan oleh karenanya perlu direspon dengan penuh kesadaran.

Ketiga, paradigma pluralis. Paradigma ini berbeda secara substansial dengan kelompok inklusif, terlebih dengan kelompok eksklusif. Dalam pandangan kelompok pluralis, semua agama dengan cara masing-masing menempuh jalan keselamatan menuju yang mutlak (*the ultimet*), menuju Allah.¹⁹ Paradigma ini percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatannya sendiri. Pada dasarnya pandangan pluralis ini tidak menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah keseragaman bentuk agama. Sebab gagasan pluralisme keagamaan, seperti kata Raumbo Panikhar” berdiri di antara pluralitas yang tidak berhubungan dengan kesatuan monolitik. Sikap pluralistik mengekspresikan adanya “fenomena” satu Tuhan “banyak agama” yang berarti suatu sikap toleran terhadap adanya jalan lain kepada Tuhan.²⁰

Dari berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa indikator “pemahaman” pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menerangkan, dan menafsirkan dalam pengalaman empiris. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengertian lain, jika pada taraf pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang

¹⁹ Carl & Breiten dan Robert W Jenson, *The Anomimus Christian* “Kristen Anonim

²⁰ John Hicks. “the religions are equally valid to the some through (Son deego, Grenhoven, Inc. 1995), 74 -90.

dimaksud secara mendalam dan hanya sekedar mengetahui tanpa dapat menangkap makna maupun arti dari sesuatu yang dipelajari, maka pada taraf pemahaman, seseorang tidak hanya dapat mengerti sesuatu yang diketahui atau diyakini, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna yang tersurat atau tersirat dari apa yang diketahui dan diyakininya.

b. Pengertian Agama

Agama, menurut Daradjat adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Thouless menyatakan bahwa agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi daripada manusia²¹.

Mahmud Syaltut menyatakan, agama adalah ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Syaikh Muhammad Abdul Badran berupaya menjelaskan arti agama dengan menunjuk kepada Al-Qur'an, bahwa agama adalah hubungan antara makhluk dengan khaliknya. Hubungan ini diwujudkan dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya. Menurut Harun Nasution, "agama adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan melalui Rasul". Sedangkan Leuba mendefinisikan agama adalah "peraturan Ilahi yang mendorong manusia berakal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, oleh karena agama diturunkan Tuhan

²¹ Thouless, dalam Daradjat, 1991.

kepada manusia adalah untuk kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat”.

Ada beberapa istilah lain dari agama, seperti; religion (Inggris), religie (Belanda) religio (Latin) dan dien (Arab). Menurut Driakarya kata “religi” berasal dari bahasa latin religio yang akar katanya religare yang berarti mengikat. Maksudnya adalah bahwa agama mengandung kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia serta dengan alam sekitarnya.

Beberapa ahli menganggap bahwa dalam diri manusia terdapat suatu instink atau naluri yang disebut sebagai naluri beragama, yaitu suatu naluri untuk meyakini dan mengadakan penyembahan terhadap suatu kekuatan di luar diri manusia. Naluri inilah yang mendorong manusia untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kuypers menggunakan istilah motif teologis untuk menjelaskan dorongan pada manusia untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan²². Dradjat mengemukakan istilah kesadaran agama (*religious consciousness*) dan pengalaman agama (*religious experience*). Kesadaran agama merupakan segi agama yang terasa dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan sebagai aspek mental dari aktivitas agama.

Abu Ahmadi menyatakan terdapat dua pengertian agama berdasarkan bahasa, yaitu: (i) Agama diartikan dengan haluan, peraturan, jalan atau kebaktian kepada Tuhan, dan (ii) agama itu terdiri dari dua perkataan yaitu “A” berarti tidak, “Gama” berarti kacau balau, tidak teratur. Jadi agama berarti tidak kacau balau yang berarti teratur.

²² Kuypers, dalam Walgito, 1986.

Suatu agama biasanya melingkupi tiga persoalan pokok, yaitu :

- 1) Keyakinan (*credial*), yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta alam.
- 2) Peribadatan (*ritual*), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya.
- 3) Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan nya tersebut.

Selain itu, dalam suatu agama terdapat lima unsur yang harus ada, yakni: (a) adanya keyakinan pada yang gaib; (b) adanya kitab suci sebagai pedoman, (c) adanya Rasul pembawanya, (d) adanya ajaran yang bisa dipatuhi, dan (e) adanya upacara ibadah yang standar.

Pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran agama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Apapun istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut aspek agama di dalam diri manusia, kesemuanya menunjuk kepada suatu fakta bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan itu memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Berangkat dari beberapa pendapat di atas, maka pemahaman agama dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menerangkan, menafsirkan, memberi contoh, serta melaksanakan keyakinan agamanya baik ketika berhubungan dengan Tuhannya, maupun sesama makhluk Tuhan. Selain itu juga kemampuan tentang bagaimana seharusnya menjalankan apa yang diyakininya, mempertahankan sesuatu yang dianggap benar, membedakan

mana yang baik dan buruk, yang tercermin dari kepribadiannya.

Oleh karena demikian luas makna pemahaman agama, maka dalam penelitian ini pemahaman agama dibatasi pada aspek-aspek: jihad, ekonomi, politik, dan budaya, yang dianggap dapat menimbulkan atau berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

B. KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1. Kerangka Berpikir

Sikap dan kepribadian seseorang yang telah memiliki pemahaman tentang ajaran agama akan berbeda jika dibandingkan dengan seseorang yang tidak, belum, atau kurang memiliki pemahaman tentang ajaran agama. Perbedaan tersebut akan terlihat dalam perilaku dan perbuatannya sehari-hari. Seseorang yang telah memahami ajaran agamanya cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dalam agamanya dan selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku hamba Allah. Orang tersebut juga akan selalu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang bahkan yang diharamkan dalam ajaran agamanya.

Seorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agama, tak terkecuali orang Islam, ia cenderung akan selalu melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dengan melaksanakan semua yang diperintahkan Nya, dan meninggalkan semua yang dilarang Nya.

Dalam konsep Islam, kehadiran manusia di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah Allah. Oleh karena itu setiap orang Islam harus berbuat baik terhadap setiap makhluk Allah, dia harus menjadikan dunia ini aman, tentram dan damai. Semakin mendalam pemahaman agama seorang Islam,

maka makin kuat dorongan baginya untuk bertindak sebagai khalifah Allah, menjadikan bumi ini aman, damai, dan sejahtera. Orang Islam yang pemahaman agamanya baik, maka ia tidak akan membuat kerusakan di bumi, tidak menyakiti sesama makhluk ciptaan Allah, karena ia menyadari tujuan diturunkannya di muka bumi ini adalah untuk menjadi kalifah. Ia berusaha menjadikan bumi ini adil, makmur dan sejahtera, aman dan tenteram penuh persaudaraan, mencegah munculnya ketidakadilan, dan tidak akan melakukan tindak kekerasan apalagi dengan mengatasnamakan agama, dan bukan sebaliknya menjadikan bumi ini penuh kekacauan, penuh ketidakadilan, membunuh, melakukan tindak kekerasan, peperangan yang semuanya menjimbulkkan kerusakan dan kehancuran.

Berdasarkan pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang betul-betul memahami agamanya, maka ia akan menghindari dan atau mencegah timbulnya kekerasan atas nama agama. Atau dengan perkataan lain orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, maka dalam mengaktualisasikan agamanya tidak akan melakukan tindak kekerasan atas nama agama.

2. *Hipotesis*

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah disajikan di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a) Terdapat hubungan negatif antara pemahaman agama dengan tindak kekerasan atas nama agama;
- b) Terdapat hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama;
- c) Terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama berdasarkan pemahaman agama. Artinya, terdapat

perbedaan tindak kekerasan atas nama agama *antara* orang yang *pemahaman agamanya tinggi* dengan yang *pemahaman agamanya rendah*;

- d) Terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama berdasarkan aktualisasi ajaran agama. Artinya, terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama *antara* orang yang *aktualisasi ajaran agamanya kuat* dengan yang *aktualisasi ajaran agamanya lemah*.

Secara statistik hipotesis di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

- a) $H_0 : \tilde{n}_{x1y} = 0$ (Tidak terdapat hubungan antara pemahaman agama dengan tindak kekerasan atas nama agama);

$H_1 : \tilde{n}_{x1y} < 0$ (Terdapat hubungan negatif antara pemahaman agama dengan tindak kekerasan atas nama agama);

- b) $H_0 : \tilde{n}_{x2y} = 0$ (Tidak terdapat hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama);

$H_1 : \tilde{n}_{x2y} \neq 0$ (Terdapat hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama);

- c) $\mu_{y \times 1a} = \mu_{y \times 1b}$ (Tidak terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang memiliki pemahaman agama tinggi dengan orang yang memiliki pemahaman agama rendah);

$\mu_{y \times 1a} \neq \mu_{y \times 1b}$ (Terdapat perbedaan tindak kekerasan agama antara orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi dengan orang yang memiliki pemahaman agama rendah);

d) $\mu_{y \times 2a} = \mu_{y \times 2b}$ (Tidak terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi dengan orang yang memiliki pemahaman agama rendah);

$\mu_{y \times 2a} \neq \mu_{y \times 2b}$ (Terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi dengan orang yang memiliki pemahaman agama rendah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di enam (6) propinsi di Indonesia, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Setiap propinsi di atas diambil dua (2) kabupaten/ kota, kemudian setiap kabupaten/kota yang dipilih, ditentukan satu (1) kecamatan sebagai sampel penelitian. Dengan demikian lokasi penelitian ini adalah dua belas (12) kecamatan dari enam (6) propinsi di atas. Penelitian dilaksanakan mulai bulan September s/d Desember 2009.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu data dideskripsikan dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, dan dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif *emic*, yaitu data hasil wawancara dengan narasumber terpilih. Penafsiran data dilakukan secara alamiah, yakni penafisiran data sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang dipersepsi peneliti karena data tersebut terpola dalam sistem pola tersendiri,²³ sedangkan pengumpulan data bersifat overt.²⁴

²³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1990), h. 54.

²⁴ Robert Bogdan dan Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: Cyracuse University. 1975), h. 13.

1. *Populasi dan Teknik Sampling*

Populasi target penelitian adalah umat Islam di enam propinsi yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Sampel diambil dengan menggunakan *teknik Multistage Random Sampling*. Langkah-langkah pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Stage pertama, adalah memilih secara purposif enam propinsi dari 33 propinsi yang ada di Indonesia. Dari langkah ini terpilih 6 propinsi sebagaimana tertera di atas. Pemilihan propinsi didasarkan atas kriteria propinsi yang dianggap pernah atau potensial timbul kekerasan atas nama agama;

Stage kedua, secara purposif, dimabil dua kabupaten dari setiap propinsi yang telah ditentukan dalam stage pertama. Yang dimaksud purposif adalah kabupaten/kota yang pernah atau berpotensi munculnya tindak kekerasan. Penentuan daerah pada stage kedua menggunakan data sekunder.

Stage ketiga, secara purposive dipilih lokasi penelitian, yaitu satu kecamatan yang pernah terjadi kasus kerusuhan atau kecamatan yang berpotensi timbul kekerasan atas nama agama di kabupaten/kota yang telah ditetapkan pada stage kedua di atas. Kemudian di tiap kecamatan lokasi penelitian ditetapkan 30 orang responden sebagai sampel, yang akan dikenakan angket. Penentuan 30 orang responden di tiap lokasi penelitian dilakukan secara random. Meskipun demikian diupayakan agar responden mewakili organisasi keagamaan yang mainstream di tiap lokasi penelitian.

Untuk triangulasi data, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara kepada tokoh masyarakat, atau para aparat penegak hukum yang pernah terkena/terlibat, pernah tahu, pernah menyelesaikan permasalahan kekerasan atas nama agama di tempat tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yaitu: (1) penyebaran kuesioner (angket) kepada 30 responden yang terdiri atas pengurus organisasi keagamaan dan masyarakat yang ada di daerah penelitian; (2) wawancara mendalam kepada para informan yang terdiri atas para penegak hukum, tokoh masyarakat yang pernah terkena tindak kekerasan atas nama agama, serta individu yang pernah melakukan kekerasan atas nama agama; (3) observasi terhadap lingkungan institusi/lembaga yang pernah melakukan tindak kekerasan atas nama agama; dan (4) studi dokumen, yaitu peneliti berusaha mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus tindak kekerasan atas nama agama yang ada di instansi termasuk institusi penegak hukum, lembaga keagamaan, serta dokumen terkait lainnya.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga jenis. *Jenis pertama angket*, berkenaan dengan pemahaman keagamaan dan tindak kekerasan atas nama agama. *Kedua pedoman wawancara*, untuk mendapatkan data tentang: (a) kekerasan atas nama agama: (b) faktor-faktor penyebab; serta (c) bentuk dan jenis kekerasan yang terjadi. *Ketiga adalah pedoman observasi* untuk mendapatkan gambaran yang jelas akan sarana-prasarana, akibat tindak kekerasan atas nama agama, serta alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan tindak kekerasan atas nama agama. *Keempat, portfolio*, yakni bukti-bukti baik yang tertulis maupun foto-foto berkenaan dengan tindak kekerasan atas nama agama.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis secara kuantitatif, sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumen dan observasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi. Hasil analisis data kualitatif ini

dipergunakan untuk memperkaya informasi data yang diperoleh dari data kuantitatif.

Pengolahan dan analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain adalah; skor maksimal dan minimal, nilai rerata dan standar deviasi, serta penyajian dalam *crostabulasi*.

Angket disusun menggunakan model Likert, dengan rentang skor 1 s/d 5 untuk butir-butir yang positif, dan skor 5 s/d 1 untuk butir-butir negatif.

Adapun pedoman pengelompokan skor (rentang skor) pemahaman keagamaan dan tindak kekerasan atas nama agama, serta sebutan untuk masing-masing rentang skor, dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Pedoman Pengelompokan Skor dan Sebutan

| Pemahaman Keagamaan | | Tindak Kekerasan Atas Nama Agama | |
|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| Rentang Skor | Sebutan | Rentang Skor | Sebutan |
| 0,00 s/d 1,20 | Sangat Kurang | 0,00 s/d 1,20 | Sangat Tidak Setuju |
| 1,21 s/d 2,40 | Kurang | 1,21 s/d 2,40 | Tidak Setuju |
| 2,14 s/d 3,60 | Sedang | 2,14 s/d 3,60 | Tidak Berpendapat |
| 3,61 s/d 4,80 | Tinggi | 3,61 s/d 4,80 | Setuju |
| 4,81 s/d 5,00 | Sangat Tinggi | 4,81 s/d 5,00 | Sangat Setuju |

Sedangkan statistik inferensial yang digunakan adalah statistik regresi dan korelasi, untuk mengetahui hubungan

antar variabel, dan uji "t", dan ANOVA, untuk mengetahui perbedaan antar variabel.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan lengkap serta pemaknaan yang mendalam terhadap tindak kekerasan atas nama agama dan upaya yang perlu dilakukan dalam pencegahan tindak kekerasan atas nama agama, data hasil analisis secara kuantitatif dilanjutkan dengan analisis kualitatif, yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan para informan terpilih secara purposif. Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 (*Statistic Package for Social Sciences* versi 16.0).

BAB IV

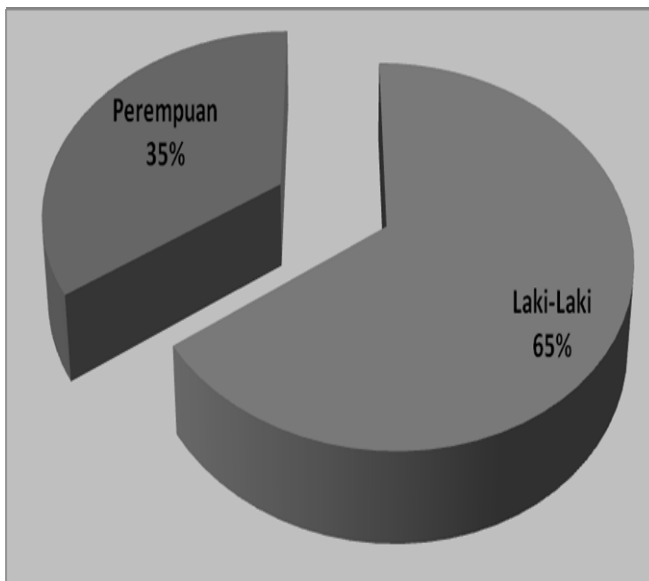
ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui profil responden penelitian, sekaligus untuk menggambarkan keterwakilan dari populasi, maka berikut ini akan dideskripsikan profil enam kriteria yakni: (1) jenis kelamin; (2) responden berdasarkan wilayah/lokasi penelitian; (3) usia; (4) jenjang pendidikan; (5) jenis pekerjaan; dan (6) afiliasi terhadap organisasi keagamaan yang ada.

1. Jenis Kelamin Responden

Jumlah responden menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam Grafik 1 berikut:



Berdasarkan jenis kelamin sebagaimana “Grafik Pie” di atas, diketahui bahwa mayoritas responden penelitian adalah laki-laki yakni sebanyak 234 orang atau 65% dari jumlah seluruh responden, sedangkan sisanya sebesar 126 orang atau 35% adalah perempuan. Meskipun berdasarkan data Badan Pusat Statisti (BPS) diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan akan tetapi berdasarkan kenyataan lapangan mayoritas peserta demo atau aksi-aksi kekerasan yang nampak di televisi, atau yang kita baca dalam surat kabar-surat kabar adalah laki-laki. Berdasarkan pertimbangan demikian maka dapat diambil inferensi bahwa berdasarkan jenis kelamin responden sudah representatif dari populasi.

2. Responden Berdasarkan Wilayah Penelitian

Sebaran responden penelitian berdasarkan wilayah penelitian, dideskripsikan dari dua aspek, yaitu; (1) propinsi dan (2) kabupaten. Sebagaimana dinyatakan dalam Bab III Metode Penelitian, bahwa penentuan sampel penelitian dilakukan secara multistage random sampling yang terdiri atas tiga tahap, yaitu penentuan 6 propinsi dilakukan secara purposive. Kemudian dengan teknik yang sama (purposif) dilakukan penentuan 2 kabupaten untuk tiap propinsi terpilih. Pemilihan propinsi dan kabupaten dengan pertimbangan propinsi dan kabupaten yang berdasarkan catatan pernah dan atau memiliki potensi terjadinya kekerasan atas nama agama. Dengan pertimbangan demikian maka diperoleh enam propinsi dan dua belas kabupaten sebagaimana tertera dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Jumlah Responden berdasarkan Propinsi dan Kabupaten

| No | Propinsi | Kabupaten/Kota |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | Jawa Tengah | Solo |
| | | Temanggung |
| 2. | Jawa Barat | Kota Depok |
| | | Tasikmalaya |
| 3. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram |
| | | Lombok Timur |
| 4. | Sulawesi Tengah | Palu Barat |
| | | Kulawi_Sigi |
| 5. | Sulawesi Selatan | Kota Makasar |
| | | Kabupaten Goa |
| 6. | Kalimantan Barat | Pontianak Kota |
| | | Singkawang |

3. Usia Responden

Rentang usia responden secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Rentang Usia Responden

| No | Rentang Usia | Frek. | Frekuensi Relatif (%) | Frekuensi Kumulatif |
|----|--------------|-------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 18 - 25 | 26 | 7 | 7 |
| 2 | 26 - 33 | 60 | 17 | 24 |
| 3 | 34 - 41 | 87 | 24 | 48 |
| 4 | 42 - 49 | 108 | 30 | 78 |
| 5 | 50 - 57 | 52 | 15 | 93 |
| 6 | 58 - 65 | 15 | 4 | 97 |
| 7 | 66 - 73 | 12 | 3 | 100 |
| | Jumlah | 360 | 100 | |

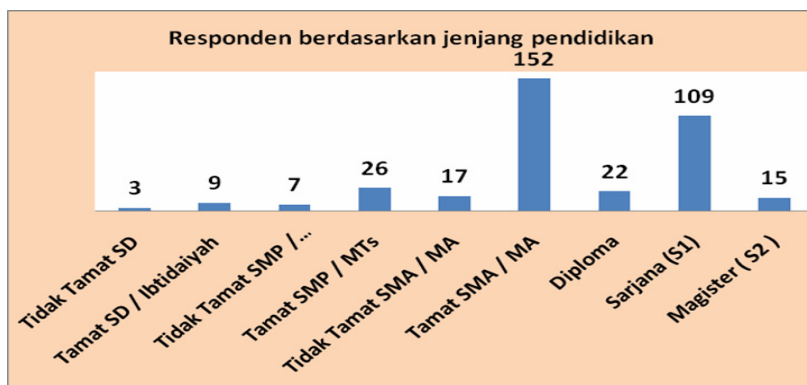
Dari tabel 4.2, di atas diketahui bahwa usia termuda responden adalah 18 tahun, sedangkan usia tertua adalah 73 tahun. Dari hasil tabulasi data angket diketahui usia termuda 18 tahun sebanyak dua orang, dan usia tertua 73 tahun sebanyak satu orang. Secara mayoritas rentang usia responden penelitian adalah antara 42 sampai dengan 49 tahun sebanyak 108 orang, atau 30% dari jumlah seluruh responden, rentang usia antara 34 s/d 41 tahun sebanyak 87 orang atau 24 %, dan rentang usia antara 26 s/d 33 tahun, serta rentang usia 50 s/d 57 tahun masing-masing 60 dan 52 orang, atau 17% dan 15 %, dari seluruh sampel penelitian. Berdasarkan Tabel 4.2 di atas juga diketahui bahwa sebanyak 333 orang atau 95 %, termasuk dalam rentang usia aktif dan produktif. Berdasarkan rentang usia responden penelitian dapat diambil inferensi bahwa rentang usia responden sudah mewakili rentang usia sesungguhnya populasi masyarakat Indonesia.

4. Pendidikan Responden

Responden dilihat dari segi jenjang pendidikannya dapat diperhatikan Grafik 2 berikut:

Grafik 2

Jumlah Responden Menurut Jenjang Pendidikan



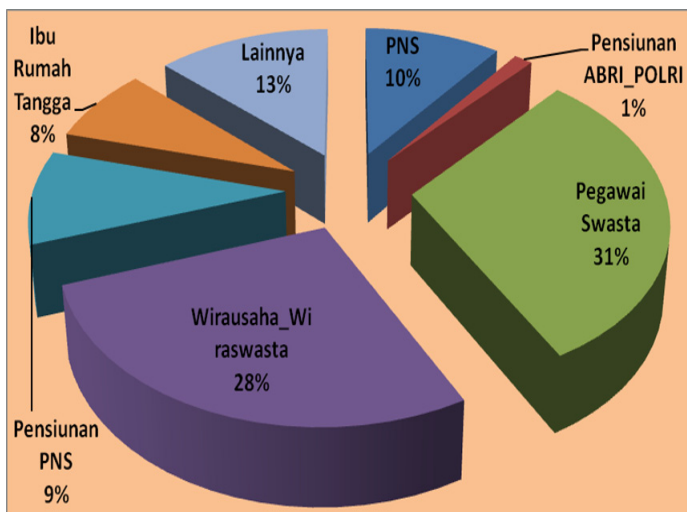
Jenjang pendidikan responden dalam angket dikelompokkan menjadi 10 tingkatan, mulai dari tidak tamat Sekolah Dasar (SD) / tidak tamat Madrasah Ibtidaiyah (MI), sampai dengan Doktor (S3). Namun berdasarkan hasil tabulasi data diketahui tidak ada responden dengan jenjang pendidikan Doktor (S3). Secara hierarki dari jumlah terbesar sampai dengan jumlah terkecil responden penelitian berdasarkan jenjang pendidikan adalah: (1) tamat SMA / MA, sebanyak 152 orang; (2) Sarjana (S1) sebanyak 109 orang; (3) tamat SMP/ MTs sebanyak 26 orang, dan Diploma sebanyak 22 orang; (4) tidak tamat SMA / MA, sebanyak 17 orang; (5) Magister (S2) sebanyak 15 orang. Sisanya berjumlah 19 orang tidak tamat SMP/MTs ke bawah. Meskipun ada responden yang tidak tamat SMP/ MTs, atau tidak tamat SD/MI tetapi dapat membaca angket. Hal ini terbukti dari tidak adanya butir-butir angket yang kosong, baik pada jawaban alternatif maupun untuk jawaban berupa isian.

Berdasarkan jenjang pendidikan di atas, dapat dikatakan bahwa responden penelitian sudah mewakili representasi pendidikan dari keseluruhan populasi.

5. Pekerjaan Responden

Keragaman responden menurut jenis pekerjaan, dapat dilihat dalam Grafik 3 (Grafik Pie) di bawah ini.

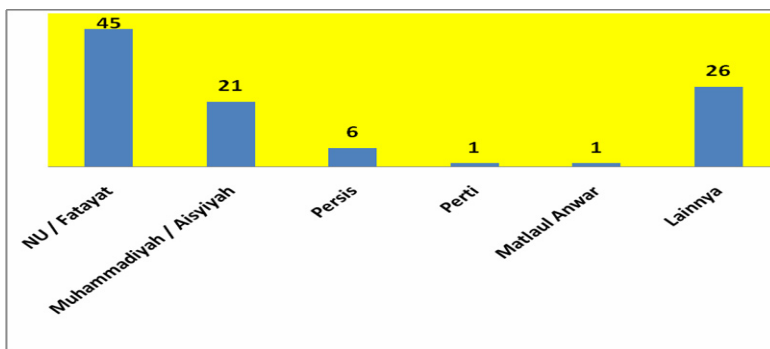
Grafik 3
 Responden Menurut Jenis Pekerjaan



6. Organisasi Keagamaan Yang Diikuti Responden

Keikutsertaan responden dalam organisasi keagamaan berikut jumlahnya, dapat dilihat dalam Grafik 4 berikut:

Grafik 4
 Jumlah Responden Menurut Organisasi Keagamaan Yang Diikuti



Untuk memperdalam gambaran organisasi keagamaan yang diikuti responden berdasarkan propinsi, maka dilakukan analisis tabulasi silang (*crosstabulation*), yang hasilnya dapat dilihat dalam tabel 4.3, berikut ini.

Tabel 4.3.

Organisasi Keagamaan Responden Menurut Propinsi Wilayah Penelitian

| Propinsi Penelitian | Organisasi keagamaan yang diikuti | | | | | | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-------|---------------|---------|--------|
| | NU / Fatayat | Muhammadiyah / Aisyiyah | Persis | Perti | Matlaul Anwar | Lainnya | |
| Jawa Tengah | 4.4% | 4.2% | 4.7% | .3% | | 3.1% | 16.7% |
| Kalimantan Barat | 11.7% | 3.3% | | | | 1.7% | 16.7% |
| Sulawesi Tengah | 6.7% | 1.9% | .8% | .3% | .6% | 6.4% | 16.7% |
| Jawa Barat | 12.8% | 1.9% | .3% | | | 1.7% | 16.7% |
| Sulawesi Selatan | 3.9% | 7.5% | | | | 5.3% | 16.7% |
| Nusa Tenggara Barat | 5.3% | 1.7% | .3% | .3% | .3% | 8.9% | 16.7% |
| Total | 44.7% | 20.6% | 6.1% | .8% | .8% | 26.9% | 100.0% |

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, mayoritas responden berafiliasi dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama sebanyak 142 responden atau 44,7% dari jumlah seluruh responden. Dalam jumlah yang juga relatif besar yakni sebanyak 99 responden atau 26,9 %, menyatakan tidak berafiliasi dengan organisasi keagamaan yang ada, atau boleh jadi berafiliasi dengan paham/aliran keagamaan yang baru, tidak termasuk dalam mainstream organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Prosentase terbesar ketiga 20.6%, atau sebanyak 74 responden, menyatakan berafiliasi atau menjadi

anggota atau partisipan organisasi Muhammadiyah untuk laki-laki, dan Aisyiyah untuk perempuan dewasa. Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni, NU dan Muhammadiyah ternyata ada wakilnya dari setiap propinsi penelitian.

Demikian juga hampir di setiap propinsi penelitian ada responden yang tidak menjadi anggota/partisipan organisasi keagamaan yang ada; atau boleh jadi dapat juga dikatakan bahwa di setiap propinsi penelitian terdapat responden yang menjadi anggota/simpatikan organisasi/ paham keagamaan di luar lima organisasi keagamaan yang ada.

B. JAWABAN TERHADAP MASALAH PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat hubungan antara pemahaman agama dengan tindak kekerasan atas nama agama;
- 2) Apakah terdapat hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama;
- 3) Apakah terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi dengan yang memiliki pemahaman agama yang rendah;
- 4) Apakah terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara yang kuat keinginannya untuk melakukan aktualisasi agama dengan yang kurang kuat.

a. Jawaban Terhadap Rumusan Masalah Nomor 1:

Dari rumusan masalah nomor 1 (satu) di atas, diketahui bahwa tujuan penelitian ini ingin mengetahui ada tidaknya kaitan/hubungan antara pemahaman agama, sebagai variabel bebas (X), dengan tindak kekerasan atas nama agama sebagai variabel terikat (Y). Untuk menjawab rumusan masalah

tersebut statistik yang digunakan adalah korelasi dan regresi. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan SPSS versi 16, diperoleh harga koefisien korelasi (r_{xy}) sebagaimana terdapat dalam Tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4
Harga Koefisien Korelasi

| | | Pemahaman Agama | Kekerasan Atas Nama Agama |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Pemahaman Agama | Pearson Correlation | 1 | -.352(**) |
| | Sig. (1-tailed) | | .000 |
| | N | 360 | 360 |
| Kekerasan Atas Nama Agama | Pearson Correlation | -.352(**) | 1 |
| | Sig. (1-tailed) | .000 | |
| | N | 360 | 360 |

**** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**

Sebagaimana tergambar dalam Tabel 4.4 di atas, diketahui harga koefisien korelasi antara pemahaman agama (X), dengan kekerasan atas nama agama (Y) = -0,352. Untuk mengetahui apakah harga koefisien korelasi tersebut signifikan atau tidak, maka harus dikonsultasikan dengan harga "t" tabel. Untuk itu harga koefisien korelasi dikonversi keharga "t", dan diperoleh harga " $t_{hitung} = 18,31$, sedangkan harga $t_{tabel} = 1,06$. Karena harga $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka kita menerima harga koefisien korelasi "signifikan", sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian maka dapat disimpulkan "terdapat hubungan antara pengetahuan agama dengan kekerasan atas nama agama". Sedangkan harga koefisien korelasi yang negatif, berarti hubungan tersebut negatif. Maksudnya, jika pengetahuan agama meningkat, maka

kekerasan atas nama agama akan menurun; dan sebaliknya pengetahuan agama kurang, maka kekerasan atas nama agama meningkat. Dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan perhitungan statistik adalah, “terdapat hubungan negatif antara pengetahuan agama dengan tindak kekerasan atas nama agama”. Semakin baik pengetahuan agama seseorang, maka semakin tidak terdorong orang tersebut untuk melakukan tindak kekerasan atas nama agama; dan sebaliknya makin kurang pengetahuan agama seseorang, maka kecenderungan melakukan kekerasan atas nama agama akan meningkat.

Untuk memprediksi kecenderungan tindak kekerasan atas nama agama atas pengetahuan agama seseorang, maka digunakan persamaan regresi. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.5 di bawah ini, diperoleh persamaan regresi pengetahuan agama terhadap tindak kekerasan atas nama agama sebagai berikut: $\hat{Y} = 104,850 - 0,366 X$ Coefficients(a).

Tabel 4.5.

Harga Konstanta Untuk Persamaan Regresi Y atas X

| Model | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|--------|------------|
| | B | Std. Error | B | Std. Error |
| (Constant) | -104.850 | 8.061 | 13.006 | .000 |
| Variabel X | .366 | .048 | 7.662 | .000 |

a Dependent Variable: Kekerasan Atas Nama Agama

Sebelum persamaan tersebut digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pemahaman keagamaan (X) dengan perilaku tindak kekerasan atas nama agama, maka perlu dipenuhi asumsi statistik regresi yaitu; (i) persamaan regresi signifikan (bermakna), dan (ii) persamaan regresi

linear. Untuk menguji kedua asumsi tersebut dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji F. Hasil analisis dapat dilihat dalam Tabel 4.6 ANOVA (b) untuk uji signifikansi regresi, dan Tabel 4.7 ANOVA Tabel untuk uji linearitas. Kedua tabel dimaksud, masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Uji Kebermaknaan Regresi $\hat{Y} = 104,850 - 0,366 X$
ANOVA(b)

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|-----|-------------|--------|---------|
| Regression | 9496.888 | 1 | 9496.888 | 50.616 | .000(a) |
| Residual | 67170.087 | 358 | 187.626 | | |
| Total | 76666.975 | 359 | | | |

a Predictors: (Constant), Pemahaman Keagamaan

b Dependent Variable: Kekerasan Atas Nama Agama

Tabel 4.7.
Uji Linearitas Regresi $\hat{Y} = 104,850 - 0,366 X$
ANOVA Table

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|--------------------------|----------------|-----|-------------|--------|------|
| Between Groups | (Combined) | 23471.271 | 72 | 325.990 | 1.759 | .001 |
| | Linearity | 9496.888 | 1 | 9496.888 | 51.237 | .000 |
| | Deviation from Linearity | 13974.383 | 71 | 196.822 | 1.062 | .360 |
| Within Groups | | 53195.704 | 287 | 185.351 | | |
| Total | | 76666.975 | 359 | | | |

Dari Tabel 4,6 di atas, diketahui bahwa persamaan regresi sangat signifikan, karena $F_{hitung} = 50,616$ lebih besar dari F_{tabel} , untuk alpha 5%= 6,63. Demikian juga untuk asumsi kedua, linearitas, persamaan regresi linear karena F_{hitung}

penyimpangan dari linearitas sebesar 1,062, lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 1,60. Dengan dipenuhinya kedua asumsi yaitu persamaan regresi signifikan dan persamaan regresi linear, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa “terdapat hubungan negatif antara pemahaman agama (X) dengan tindak kekerasan atas nama agama (Y)”, dengan bentuk persamaan sebagai berikut: $\hat{Y} = 104,850 - 0,366 X$. Dapat dikatakan, jika pemahaman agama seseorang meningkat satu unit, maka kecenderungan untuk melakukan tindak kekerasan akan berkurang sebesar 0,366.

b. Jawaban Terhadap Rumusan Masalah Nomor 2:

Permasalahan penelitian kedua dirumuskan sbb:

Apakah terdapat hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama, dapat dilihat hasil analisis harga koefisien korelasi sebagaimana tertera dalam Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8.

Harga Koefisien Korelasi Antara Aktualisasi Ajaran Agama Dengan Kekerasan Atas Nama Agama

| | | Kekerasan Agama atas nama agama | Aktualisasi Ajaran Agama |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Kekerasan atas nama Agama | Pearson Correlation | 1 | .096(*) |
| | Sig. (1-tailed) | | .034 |
| | N | 360 | 360 |
| Aktualisasi Ajaran Agama | Pearson Correlation | .096(*) | 1 |
| | Sig. (1-tailed) | .034 | |
| | N | 360 | 360 |

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana terdapat dalam Tabel 4.8, diketahui bahwa harga koefisien korelasi (r_{xy}) = 0,096, meskipun harga koefisien korelasi positif dan signifikan karena harga $t_{hitung} = 2,1$, lebih besar dari harga $t_{tabel} = 1,64$.

Untuk mengetahui atau memprediksi apakah aktualisasi ajaran agama dapat menimbulkan perilaku kekerasan atas nama agama, dapat dicari melalui statistik regresi, dengan harga sebagaimana terdapat dalam Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Harga Konstanta Untuk Persamaan Regresi Y atas X

| Model | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|
| | B | Std. Error | B | Std. Error |
| (Constant) | 15.254 | 1.259 | 12.114 | .000 |
| Aktualisasi Ajaran Agama | -.077 | .042 | 1.825 | .069 |

a Dependent Variable: Kekerasan Atas Nama Agama

Dari hasil penghitungan, diperoleh harga persamaan regresi sbb: $\hat{Y} = 15,254 - 0,077X$. Persamaan regresi $\hat{Y} = 15,254 - 0,077X$, dapat digunakan untuk memprediksi / menduga pengaruh variabel aktualisasi ajaran agama (X) dengan tindak kekerasan atas nama agama, jika dipenuhi dua asumsi statistik regresi yaitu: (i) persamaan regresi signifikan (bermakna); dan (ii) persamaan regresi linear. Untuk menguji kedua asumsi tersebut dilakukan penghitungan dengan menggunakan uji F. Hasil analisis dapat dilihat dalam Tabel 4.10 ANOVA (b) untuk uji signifikansi regresi dan Tabel 4.11 ANOVA tabel untuk uji linearitas di bawah ini:

Tabel 4.10
 Uji Kebermaknaan Regresi $Y = 15,254 - 0,077 X$
ANOVA(b)

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|-----|-------------|-------|---------|
| Regression | 30.766 | 1 | 30.766 | 3.331 | .069(a) |
| Residual | 3306.834 | 358 | 9.237 | | |
| Total | 3337.600 | 359 | | | |

a Predictors: (Constant), Aktualisasi Ajaran Agama

b Dependent Variable: Kekerasan Atas Nama Agama

Tabel 4.11
 Uji Linearitas Regresi $\hat{Y} = 104,850 - 0,366 X$
ANOVA Table

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|--------------------------|----------------|-----|-------------|-------|------|
| Between Groups | (Combined) | 268.247 | 20 | 13.412 | 1.481 | .085 |
| | Linearity | 20.766 | 1 | 20.766 | 2.294 | .066 |
| | Deviation from Linearity | 237.481 | 19 | 22.499 | 2.485 | .133 |
| Within Groups | | 3069.353 | 339 | 9.054 | | |
| Total | | 3337.600 | 359 | | | |

Dari tabel 4,10,diketahui bahwa persamaan regresi tidak signifikan, karena $F_{hitung} = 3,331$ lebih kecil dari F_{tabel} , untuk alpha 5 %= 6,63. Demikian juga untuk asumsi kedua (Tabel 4.11) linearitas, persamaan regresi tidak linear karena F_{hitung}

penyimpangan dari linearitas sebesar 2.485, lebih besar dari F_{tabel} sebesar 1,60. Dengan tidak dipenuhinya kedua asumsi karena persamaan regresi tidak signifikan (tidak bermakna) dan persamaan regresi tidak linear, maka kita tidak dapat menarik kesimpulan dan memprediksi. Inferensi yang dapat diambil dari hasil analisis korelasi dan regresi adalah, terdapat hubungan antara aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama, akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa aktualisasi ajaran agama akan memunculkan tindak kekerasan atas nama agama. Sehingga kalau terjadi tindak kekerasan atas nama agama dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka faktor penyebabnya bukan karena umat Islam mengaktualisasikan ajaran agamanya, melainkan faktor lain, yang akan dicoba ditemukan dalam analisis data selanjutnya.

Temuan ini sejalan dengan temuan kualitatif di lapangan, sebagaimana yang dikatakan oleh pada informan penelitian, bahwa dalam kegiatan pengaktualisasian ajaran Islam dalam masyarakat, seperti: salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pemotongan hewan Qurban, sunatan, aqiqah, dan sebagainya umat non Islam ternyata ikut berpartisipasi, merasakan, ikut merayakan serta turut bergembira sebagaimana yang dirasakan oleh umat Islam. Sebaliknya, umat Islampun seringkali ikut berpartisipasi dalam merayakan ajaran agama non Islam. Dengan kegiatan aktualisasi ajaran agama yang mendapat respon atau partisipasi dari umat lain itu semakin mempererat rasa persaudaraan dan menjadikan kehidupan antar umat beragama menjadi lebih harmonis, hubungan menjadi lebih baik.

Tidak adanya kaitan antara keinginan aktualisasi ajaran agama dengan tindak kekerasan atas nama agama, ternyata ditunjang oleh data deskriptif jawaban responden terhadap

pernyataan berkenaan dengan pengaktualisasian ajaran agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebaran jawaban responden (dalam prosentase) selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Sebaran Jawaban Responden
Terhadap Pernyataan Aktualisasi Ajaran Islam
Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

| No | Pernyataan | Alternatif Jawaban (%) | | | | |
|----|---|--------------------------|------|------|------|------|
| | | SS | S | TT | TS | STS |
| 1. | Karena mayoritas rakyat Indonesia ber agama Islam, maka sudah seharusnya agama Islam dijadikan agama negara | 2,6 | 5,8 | 16,9 | 45,6 | 29,1 |
| 2. | Islam melarang umatnya memaksakan kehendak | 51,9 | 38,1 | 2,0 | 4,9 | 3,1 |
| 3. | Saya setuju jika pemerintah Indonesia menerapkan potong tangan bagi para pencuri | 2,9 | 5,1 | 17,0 | 58,9 | 16,1 |
| 4. | Saya setuju jika pemerintah mengambil secara paksa harta orang Islam yang kaya yang tidak mau bersedekah / berzakat | 4,3 | 4,8 | 11,7 | 33,1 | 46,1 |
| 5. | Dalam Islam mengajak orang lain untuk berbuat baik harus dengan cara yang bijak | 53,6 | 33,1 | 5,9 | 3,3 | 4,1 |

Berdasarkan rangkuman data sebagaimana terdapat dalam Tabel 4.12 di atas diketahui bahwa mayoritas responden tidak ingin atau tidak setuju, jika ajaran Islam diterapkan secara paksa. Mayoritas responden menolak jika agama Islam dijadikan agama negara. Dari tabel di atas juga

diketahui bahwa cukup besar prosentase responden yang menjawab “tidak tahu”. Kenyataan ini mengindikasikan perlunya terus peningkatan pemahaman agama umat Islam Indonesia oleh Pimpinan Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Peningkatan pemahaman keagamaan dapat dilakukan dengan meningkatkan peran instansi terkait di bawahnya, bekerjasama dengan lembaga/organisasi keagamaan yang ada dalam masyarakat dan para cendekiawan di berbagai Perguruan Tinggi Agama.

c. Jawaban Terhadap Rumusan Masalah Nomor 3:

Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: *“Apakah terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antar orang yang memiliki pemahaman agama tinggi dengan yang memiliki pemahaman agama rendah.”*

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka terlebih dahulu perlu diketahui skor perbedaan pemahaman agama responden berdasarkan wilayah penelitian. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh rerata skor pemahaman responden penelitian sebagaimana tampak dalam Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Skor Pemahaman Keagamaan Responden

| Propinsi | Mean | Varians | Min | Maks | N |
|---------------------|------|---------|------|------|-----|
| Jawa Barat | 3.68 | 9.6 | 2.62 | 4.06 | 60 |
| Sulawesi Selatan | 3.64 | 6.8 | 3.00 | 4.23 | 60 |
| Sulawesi Tengah | 3.61 | 11.4 | 2.77 | 4.02 | 60 |
| Nusa Tenggara Barat | 3.47 | 12.3 | 2.65 | 4.27 | 60 |
| Kalimantan Barat | 3.42 | 8.9 | 2.6 | 4.52 | 60 |
| Jawa Tengah | 3.34 | 12.6 | 2.35 | 4.12 | 60 |
| Total | 3.47 | 0.1024 | 2.35 | 4.52 | 360 |

Dari tabel 4.13 di atas, skor rata-rata terbesar sampai dengan terkecil tentang pemahaman agama responden berdasarkan propinsi, secara berurutan adalah: (1) Jawa Barat, (2) Sulawesi Selatan, (3) Sulawesi Tengah, (4) Nusa Tenggara Barat, (5) Kalimantan Barat, dan terendah adalah (6) Jawa Tengah.

Jika dibandingkan antara skor rata-rata pemahaman agama responden penelitian secara keseluruhan, dengan skor rata-rata responden berdasarkan propinsi, dapat diketahui tiga propinsi yaitu (a) Jawa Barat, (b) Sulawesi Tengah, skor rata-rata pemahaman keagamaannya di atas rata-rata total. Sedangkan daerah penelitian Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah rerata skor penelitiannya di bawah rerata skor penelitian secara keseluruhan, yaitu 3,42, dan 3,34, < 3,47.

Adapun untuk keragaman skor, yang mengindikasikan keragaman pemahaman agama responden berdasarkan propinsi penelitian, maka diketahui propinsi Jawa Tengah dan propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki varian skor keragaman pemahaman agama yang terbesar. Sedangkan keragaman pemahaman keagamaan yang terkecil adalah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Terdapatnya perbedaan pemahaman keagamaan responden berdasarkan propinsi, boleh jadi karena terdapat perbedaan responden berdasarkan paham keagamaan yang diikuti. Sebagaimana tampak dalam Tabel 4.3, responden dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat, mayoritas berafiliasi dengan organisasi NU dan Muhammadiyah, sedangkan responden Jawa Tengah dan NTB selain dari NU dan Muhammadiyah, berasal juga dari Matlaul Anwar, Persis, dan Perti. Bahkan untuk responden dari NTB, Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah secara kuantitas cukup besar yang tidak berafiliasi dengan organisasi keagamaan yang menjadi mainstream.

Dengan diketahuinya perbedaan pemahaman agama responden, maka selanjutnya akan di jawab permasalahan penelitian, "*apakah terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang memiliki pemahaman agama tinggi dengan yang memiliki pemahaman agama rendah.*", hasil analisis dapat dilihat dalam Tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.14
Perbedaan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama
Karena Perbedaan Pemahaman Keagamaan
ANOVA

| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|----------------|----------------|-----|-------------|-------|------|
| Between Groups | 5114.981 | 5 | 1022.996 | 4.509 | .001 |
| Within Groups | 80313.883 | 354 | 226.875 | | |
| Total | 85428.864 | 359 | | | |

Berdasarkan Tabel 4.114 di atas diketahui bahwa harga $F=4,509$ dan harga signifikansi $=0,001$. Karena harga signifikansi $= 0,001$ yang berarti jauh lebih kecil dari $0,05$, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan pemahaman tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang memiliki pemahaman agama tinggi dengan yang memiliki pemahaman agama rendah.

Sebagaimana tampak dalam Tabel 4.13, varian skor pemahaman keagamaan di Propinsi NTB termasuk besar yakni $12,3$. Besarnya varian skor pemahaman masyarakat NTB, menggambarkan adanya kesenjangan pemahaman agama antar umat Islam di NTB. Akibat perbedaan dalam memahami agama inilah yang baru-baru ini di NTB, khususnya di Dusun Beroro, Desa Jembatan Kembar,

Kabupaten Lombok Barat, ratusan umat Islam karena memiliki paham keagamaan berbeda, mengusir puluhan jamaah Salafi yang tengah mengadakan pengajian di dalam surau. "Hentikan pengajian itu," teriak sebagian warga. Kekerasan tersebut ternyata dipicu oleh tata cara beribadah warga Salafi yang berbeda dengan kebiasaan warga setempat. Warga menilai tata cara beribadah warga Salafi menyimpang dari ajaran Islam, karena warga Salafi tak membacakan talqin dalam prosesi penguburan jenazah, tidak membaca doa qunut ketika salat Subuh, serta tidak mengadakan tahlilan bagi orang meninggal.

Peristiwa kekerasan atas nama agama karena perbedaan pemahaman agama, bukan yang pertama kali terjadi di Pulau Lombok. Hasil wawancara dengan para informan mengatakan ada empat peristiwa serupa yang terjadi di wilayahnya dalam enam bulan terakhir. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Ihiya' Ussunnah di Lingkungan Repok Gapuk, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Akibat yang ditimbulkan dalam aksi kekerasan ini lebih parah dari Dusun Beroro, karena sebuah gedung sekolah di pesantren itu dirusak ratusan warga.

Samad (bukan nama sebenarnya), salah seorang ustad Salafi, mengatakan dalam ajarannya memang ada sedikit perbedaan dengan tradisi masyarakat. Tetapi perbedaan itu wajar dan seharusnya tidak perlu memunculkan kekerasan, ungkap Samad. Meskipun pernah mengalami tindak kekerasan ia menyatakan, "kami tidak pernah dendam akibat masalah ini".

Konflik antara sebagian umat Islam dan kelompok Salafi ini membuat Majelis Ulama Indonesia NTB turut prihatin. Menurut Sekretaris MUI NTB, Tuan Guru Haji Mahaly Fikri, ajaran Salafi tak menyimpang dari ajaran Islam dan tidak

sesat, sehingga tidak harus dijauhi dan dimusuhi oleh umat Islam lainnya. Mahaly Fikri menambahkan masyarakat Lombok Barat memang belum siap menerima perbedaan karena belum cukup pengetahuan keagamaannya.

d. Jawaban Terhadap Permasalahan Nomor 4:

Permasalahan nomor 4, dirumuskan sebagai berikut: *"Apakah terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama antara orang yang kuat keinginan mengaktualisasikan agama dengan yang rendah"*.

Untuk menjawab permasalahan di atas, dilakukan uji beda dengan menggunakan ANOVA satu Jalur, yang hasil penghitungannya sebagaimana tampak dalam Tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15
Perbedaan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama
Karena Perbedaan Aktalisasi Ajaran Agama
ANOVA

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--|---------------------------|----------------|-----|-------------|-------|------|
| Kekerasan Agama Atas Nama Agama Aktualisasi Ajaran Agama | Between Groups (Combined) | 268.247 | 20 | 13.412 | 1.481 | .085 |
| | Within Groups | 3069.353 | 339 | 9.054 | | |
| | Total | 3337.600 | 359 | | | |

Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.15 di atas, harga $F_{hitung} = 1,481$ ternyata tidak signifikan, karena lebih kecil dari harga $F_{tabel} = 1,88$. Ini berarti tidak terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama

antara orang yang kuat keinginan untuk mengktualisasikan ajaran agama dengan yang rendah keinginan mengaktaulisasikan ajaran agama.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

Terdapat ragam jawaban informan berkenaan dengan faktor-faktor penyebab munculnya kekerasan atas nama agama. Keragaman jawaban tersebut secara garis besar dapat disimpulkan berikut:

1. Masalah sosial ekonomi:

Masalah ekonomi menjadi faktor utama penyebab timbulnya kekerasan atas nama agama. Penguasaan sektor ekonomi oleh kelompok minoritas secara agama di lingkungan mayoritas agama lain, menjadi pemicu timbulnya konflik. Ketika konflik timbul, maka sasaran utamanya adalah simbol-simbol agama terutama rumah ibadat. Hal inilah yang terjadi antara lain di Solo - Jawa Tengah, Poso - Sulawesi Tengah dan Makassar – Sulawesi Selatan;

2. Masalah pengabaian hukum:

Pengabaian hukum yang sering memunculkan kekerasan atas nama agama, di antaranya pendirian rumah ibadat. Umat Kristen, seringkali melanggar atau mengabaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat. Di NTB, kekerasan atas nama agama antara lain dipicu oleh adanya pembangunan gereja-gereja mewah yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan ditolak oleh masyarakat, tetapi tetap dibangun. Selain itu adanya pembangunan gereja yang tidak didukung oleh jumlah jemaat yang cukup dari sekitar wilayah lokasi gereja dibangun, sehingga mengesankan adanya pengabaian terhadap peraturan yang berlaku.

Masalah pengabaian hukum yang lain adalah penyiaran agama kepada kelompok umat beragama lain. Hal ini sangat menonjol dilakukan di lembaga pendidikan Kristen. Di bidang pendidikan, keberadaan sekolah-sekolah Kristen yang sebagian muridnya beragama Islam, menjadi persoalan tersendiri dalam hubungan Islam dan Kristen. Sebagai sekolah dengan misi Kristen, sekolah-sekolah Kristen merasa perlu memberikan pengajaran agama kepada seluruh siswanya tanpa memandang agama mereka. Apabila para siswa muslim bersekolah di sekolah Kristen, maka mereka wajib mengikuti tata tertib sekolah, termasuk mengikuti pelajaran agama Kristen. Kondisi tersebut tentu tidak menyenangkan umat Islam, terutama anak-anak Islam yang berasal dari keluarga berbeda agama, atau keluarga yang pemahamannya terhadap ajaran Islam kurang atau terbatas. Melalui pembelajaran agama Kristen cukup banyak anak-anak Islam yang akhirnya pindah agama ke agama Kristen;

3. Masalah politik:

Kekerasan atas nama agama, yang bermula dari masalah politik adalah kekerasan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kasus Poso di Sulawesi Tengah, merupakan potret buram hubungan antara komunitas Islam dan Kristen di Indonesia. Persaingan antara pemeluk Islam dan Kristen sebenarnya telah ada semenjak era kolonial, tetapi baru pada Era Reformasi persaingan tersebut berubah menjadi konflik berdarah. Pada era kolonial, umat Kristen mendapat banyak kemudahan di bandingkan dengan umat Islam. Pada zaman kemerdekaan terutama era orde baru, eksekusi kebijakan zaman kolonial masih belum muncul, karena kebijakan regresif orde baru untuk menghindari isu SARA. Akan tetapi era reformasi tidak terbendung dan akhirnya berbuah ledakan konflik yang sangat memilukan bangsa Indonesia;

4. Masih kuatnya rasa saling curiga di antara umat yang berbeda agama:

Keadaan demikian dapat memicu timbulnya konflik antar umat. Sebagai contoh, misalnya kecurigaan di kalangan umat Islam, bahwa lembaga, kepemimpinan, dan organisasi di kalangan umat Kristiani dirasakan masih saja melakukan "kristenisasi" dengan berbagai cara. Sebaliknya, sementara kalangan umat Kristiani mencurigai sementara kalangan umat Islam dengan dugaan adanya umat Islam yang berusaha menciptakan negara Islam di Indonesia;

5. Pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang tetapi memiliki motivasi tinggi untuk menjalankan agama:

Keadaan demikian menimbulkan adanya kelompok umat yang memiliki motivasi tinggi untuk menjalankan agamanya, tetapi rendah pengetahuan agamanya sehingga melahirkan semangat tanpa memiliki landasan pemikiran keagamaan yang kokoh, bahkan jauh dari pemahaman yang utuh dari prinsip ajaran agama. Kasus seperti ini sangat sering terjadi di kalangan masyarakat terutama yang ada di daerah pedesaan / pinggiran. Jika ada perbedaan dalam tata cara beragama, maka dengan mudah akan memunculkan konflik dan kekerasan atas nama agama.

6. Kurang tegasnya penegakan hukum:

Banyak kasus kekerasan atas nama agama terjadi karena kurang efektifnya penyelenggaraan negara, yang biasanya diwakili polisi di lapangan. Dalam banyak kasus, polisi yang ada di lapangan tidak mampu mencegah terjadinya kekerasan, atau lamban dalam menangani perilaku kekerasan secara dini, yang sesungguhnya jika segera diatasi masalahnya akan segera selesai. Tetapi karena kelambanan atau karena ketidak berdayaan aparat penegak hukum, maka kasus yang semula sederhana pada akhirnya menjadi masal dan sulit di atasi. Contoh keterlambatan / kelalaian penegak

hukum adalah adanya kerusuhan di Makasar. Isu pembantu rumah tangga yang dilecehkan majikannya yang berasal dari etnis Cina.

D. BERBAGAI SOLUSI YANG DITAWARKAN PARA INFORMAN UNTUK MENCEGAH/MENGHINDARI MUNCULNYA KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

1. Pengembangan dialog-dialog di kalangan internal maupun antar pemimpin/pemuka agama, tidak hanya di level puncak, tetapi juga level tengah dan bawah. Memang di beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tetapi dialog-dialog yang diselenggarakan FKUB pada umumnya belum tersosialisasikan ke tingkat bawah untuk kemudian secara fungsional dapat menciptakan hubungan di kalangan internal dan antar umat beragama yang lebih sehat, harmonis, dan dinamis.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya.
3. Melalui pendidikan sejak dini, baik pendidikan formal maupun informal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terdapat hubungan negatif antara pengetahuan agama dengan tindak kekerasan atas nama agama. Makin baik pengetahuan agama seseorang, maka makin tidak terdorong orang tersebut untuk melakukan tindak kekerasan atas nama agama; dan sebaliknya makin kurang pengetahuan agama seseorang, maka kecenderungan kekerasan atas nama agama akan meningkat.

Berdasarkan persamaan regresi antara variabel pengetahuan agama dengan tindak kekerasan atas nama agama, diketahui bahwa jika pengetahuan agama meningkat satu unit, maka kekerasan atas nama agama akan berkurang sebesar 0,366 unit;

2. Tidak ada kaitan antara keinginan aktualisasi ajaran agama dengan kekerasan atas nama agama. Kesimpulan ini ditunjang oleh data deskriptif jawaban responden, yang mayoritas tidak ingin atau tidak setuju jika ajaran Islam diterapkan secara paksa; dan mayoritas responden menolak jika agama Islam dijadikan agama negara;
3. Terdapat perbedaan pemahaman keagamaan responden berdasarkan propinsi, dan akibat perbedaan pemahaman ini dapat menimbulkan konflik antar umat sesama agama;
4. Tidak terdapat perbedaan tindak kekerasan atas nama agama lantaran perbedaan aktualisasi ajaran agama.

B. REKOMENDASI

1. Untuk menghindari/mengurangi kekerasan atas nama agama pada masa yang akan datang, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan instansi terkait seperti: Kementerian Dalam Negeri, Diknas, Kementerian Sosial, serta organisasi keagamaan yang ada, para tokoh - tokoh masyarakat dan para cendekiawan, mengupayakan peningkatan ekonomi masyarakat, dengan jalan pemberian akses dan peningkatan kualitas SDM, peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Jika masalah ekonomi masyarakat dapat teratasi maka permasalahan kekerasan akan hilang dengan sendirinya;
2. Dalam hal penegakan aturan dan hukum, Kementerian Agama seyogyanya meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, khususnya penegak hukum, untuk melakukan berbagai sosialisasi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama dapat lebih dipahami dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi, kiranya para juru da'wah dan tenaga penyuluh agama yang ada di berbagai daerah perlu ditingkatkan perannya dalam ceramah- ceramah agama dengan materi yang terkait dengan masalah hukum dan membangun kesadaran hukum;
3. Dalam masalah politik, kiranya Pimpinan Kementerian Agama dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan haknya, apa yang boleh dan tidak boleh. Jika masyarakat mengerti dan tahu politik, serta tahu akan konsekuensi

hukum yang akan menyimpannya, maka kekerasan ditengah masyarakat akan berkurang;

4. Kementerian Agama bersama-sama dengan organisasi keagamaan yang ada, khususnya dengan organisasi agama lain, seperti; MUI, KWI, PGI, DGI, PHDI dan Matakin, perlu terus mengembangkan dialog keagamaan. Dialog yang sudah berjalan baik selama ini perlu terus ditingkatkan dan diintensifkan. Materi dialog hendaknya perlu lebih difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang sering menimbulkan atau memicu munculnya kekerasan. Dialog tidak hanya antar pimpinan umat beragama, tetapi juga sampai kepada masyarakat kelas bawah. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai program yang dapat menimbulkan kerjasama, saling pengertian, serta tumbuh saling percaya antar umat beragama. Dalam kaitan ini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), maupun forum sejenis yang ada di berbagai daerah perlu dikembangkan terus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bana, Wiratma, J.B.,S.J., 1993, *Sains Perspektip Gereja Katolik*, Yogyakarta, Dian/Anter Fidei, hal.4.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York: Cyracuse University, hal.13.
- Carl & Breaten, Robert W. Jenson, *The Anominus Christian*, "Kristen Anominu".
- Cruchfield, E.L., Ballachey, et.al., 1962, *Individual In Society*, Tokyo, McGraw-Hill, hal.142.
- Daryl, J, Bem, 1988, *Social Psychology In The Seventies*, Belmont, California: Broke & Cole, hal.258.
- David, C., McClelland, 1976, *The Achievement Motive*, New York: Appleton-Century Crofts, hal.112.
- Emmanuel, Subangun, 1999, *Politik Anti Kekerasan Pasca Pemilu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hicks, John, 1995, *The Religions are Equally Valid to The Some Thruh*, Son Deego, Grenhoven, Inc., hal.74-90.
- Honer, Stanly, M. dan Thomas C.Hunt, 1984, dalam "Ilmu Dalam Perspektif, Jujun S. Suriasumantri (Penyunt.), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 76.
- Ismail, SM., dan Abdul Mukti (Ed.), 2000, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 43.
- Kreamer, Hendrick, 1995, *Christian Attitudes Toward no Christian Religius*, Mincapolis, Fantress Press, 222-231.
- Krishnamurti, J., 1982, *Bebas Kekerasan*, Yayasan Krishnamurti, Malang, hal.11.

- Mattew, Arnold, 2006, *Culture And Anarchy*, New York, Macmillan, Third Edition, hal.26.
- Moeleong, Lexy, J., 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal. 54.
- Purwadarminta, W.J.S., 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 636.
- Purwanto, Ngalm, 1997, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 8, hal.44.
- Rahman, Fazlhur, 1984, *Islam*, (Terj.) Ahsin, Bandung, Pustaka, hal.105.
- Saifuddin, Azwar, 1987, *Tes Prestasi*, Yogyakarta, Liberty, hal. 62.
- Schacter, S., 1961, *The Psychology of Affiliation*, London: Tavistock Publication, hal. 112.
- Sudijono, Anas, 1996, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.4, hal.50.
- Woolfolk, Anita, E., 1993, *Educational Psychology*, New York: Allyn And Bacon Inc., hal.82.